

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**STRATEGI PENGEMBANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI BENIH IKAN PANTAI MASIKA JAYA
PROVINSI MALUKU**



**TAPM ini Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan**

Disusun Oleh :

SAIFULLAH MARASABESSY

NIM: 018813221

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

ABSTRAK

Strategi Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pantai Masika Jaya Provinsi Maluku

SAIFULLAH MARASABESSY

saifullah.marasabessy@gmail.com

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Tingkat permintaan ikan konsumsi dunia mengalami peningkatan setiap saat. Di lain pihak, produksi dari kegiatan perikanan tangkap semakin menurun akibat degradasi lingkungan. Guna memenuhi permintaan pasar, sektor perikanan budidaya memiliki peluang besar untuk dikembangkan termasuk dalam hal penyediaan benih dan induk unggul. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi *eksisting* dan peluang pengembangan UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Masika Jaya, menganalisis komoditi dan jenis produk yang sesuai untuk dikembangkan serta merumuskan strategi pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya ke depan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknis pemilihan responden bersifat *purposive sampling* dan menggunakan 3 alat analisis yaitu analisis EXTAND, analisis kesesuaian jenis produk pilihan dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kondisi sarana dan prasarana serta sumberdaya aparatur di UPTD BBIP Masika Jaya berada pada level yang sangat tidak maksimal untuk menunjang optimalisasi kinerja balai terutama dalam hal penyediaan produk benih dan induk unggul secara kontinyu. Terkait kondisi tersebut, UPTD BBIP Masika Jaya saat ini perlu pula memprioritaskan arah kebijakannya untuk memproduksi dan melaksanakan distribusi dan perdagangan telur ikan. Dalam rangka optimalisasi kinerjanya, UPTD BBIP Masika Jaya perlu menerapkan 10 strategi pengembangan berdasarkan 4 kriteria pengembangan dengan urutan skala prioritas yaitu (a) revitalisasi balai benih, (b) optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana, (c) optimalisasi dan sertifikasi perbenihan, (d) pengembangan teknologi dan optimalisasi pengawasan (produk dan lingkungan), (e) efisiensi alokasi pendanaan, (f) peningkatan kerjasama antar lembaga terkait/swasta, (g) penguatan kapasitas kelembagaan pada balai, (h) optimalisasi pengembangan lahan, (i) pengembangan sistem informasi perbenihan, dan (j) optimalisasi pemasaran benih.

Kata Kunci : *Analisis kesesuaian jenis produk pilihan, analisis SWOT, EXTAND, Strategi Pengembangan, UPTD BBIP Masika Jaya.*

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Strategi Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Balai Benih Ikan Pantai Masika Jaya Provinsi Maluku

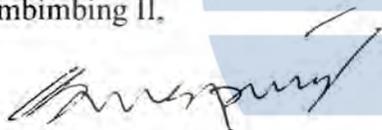
Penyusun TAPM : SAIFULLAH MARASABESSY

NIM : 018813221

Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen
Perikanan

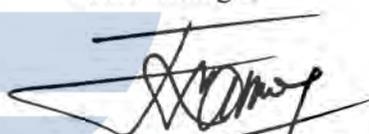
Menyetujui:

Pembimbing II,



Anak Agung M. S. Putra, MA, Ph.D
NIP. 19590704 198603 1 003

Pembimbing I,



Dr. Y. Lopulalan, S.Pi, M.Si
NIP.19700721 199702 1 002

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/Program
Magister Ilmu Kelautan Bidang
Minat Manajemen Perikanan,



Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si
NIP. 19631111 198803 2 002

Direktur Program
Pascasarjana,



Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU KELAUTAN
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN**

PENGESAHAN

Nama : SAIFULLAH MARASABESSY
NIM : 018813221
Program Studi : Manajemen Perikanan
Judul TAPM : Strategi Pengembangan Unit Pelaksanan Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pantai Masika Jaya Provinsi Maluku

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan, Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Desember 2014
Waktu : 120 Menit

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM:

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Sri Listyarini, M.Ed

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Mulyono S Baskoro, M.Sc

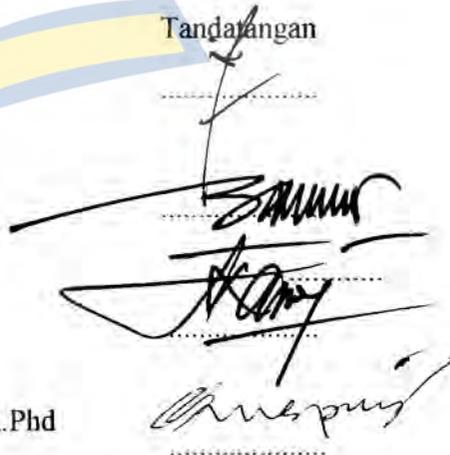
Pembimbing I

Nama : Dr. Y. Lopulalan, S.Pi, M.Si

Pembimbing II

Nama : Anak Agung Made Sastrawan Putra, MA. Phd

Tandatangan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, hingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Sains pada Program Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai saat perkuliahan hingga sampai pada penulisan/ penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya.

Pada kesempatan ini, saya sampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Ibu Suciati, M.Sc.,Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Ibu Dr. Nurhasanah, M.Si selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan.
4. Bapak Drs. C. B. Supartomo, M.Si selaku kepala Universitas Terbuka UPBJJ Ambon beserta staf.
5. Bapak Dr. Y. Lopulalan, S.Pi, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Ir. Anak Agung Made Sastrawan Putra, M.A., Ed.D. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan TAPM ini.
6. Ibu Dr. ETTY Riani, MS dan Bapak Prof. Dr. Mulyono S. Baskoro, M.Sc selaku pembahas ahli dan penguji ahli atas saran dan masukannya yang sangat konstruktif.

7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Kepala UPT Balai Budidaya Laut Ambon, Kepala UPT BBAP Situbondo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepala UPTD BBIP Masika Jaya beserta seluruh staf yang telah memberikan ruang dan waktu kepada saya guna melaksanakan penelitian dan menyelesaikan TAPM ini.
8. Bapak/Ibu dosen/fasilitator tutorial *online* maupun tutorial tatap muka yang telah meluangkan waktunya untuk menambah wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman saya selama perkuliahan.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan – Universitas Terbuka UPBJJ Ambon yang selalu bersama dalam suka dan duka serta saling menguatkan selama perkuliahan hingga penyelesaian TAPM ini.
10. Kepada istriku terkasih Elvia Ariani Buamona, S.Sos dan ketiga buah hati kami (Masyita, Zulfiqar al Hasanah dan Meutia Chairunnisa) serta ayahanda dan ibunda tercinta yang telah begitu sempurna memberikan doa dan dukungan lahir bathin kepada saya.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merahmati niat baik kita bersama dan semoga TAPM ini nantinya akan membawa manfaat bagi pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pantai Masika Jaya Provinsi Maluku.

Ambon, Januari 2015

Penulis.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. (021) 7490941, Fax. (021) 7415588

BIODATA MAHASISWA

Nama : Saifullah Marasabessy
NIM : 018813221
Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 27 Agustus 1972
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SD Inpres 22 Ambon tahun 1985
Lulus SMP di SMPN 3 Ambon tahun 1988
Lulus SMA di SMAN 1 Ambon tahun 1991
Lulus S1 di Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan
Univ. Pattimura Ambon tahun 1997
Riwayat Pekerjaan : Tahun 1999 sampai sekarang sebagai PNS pada
DKP Provinsi Maluku
Alamat Tetap : Jl. Air Kuning RT. 005/18 Batu Merah Ambon
Telp/HP : 081343015423
Email : saifullah.marasabessy@gmail.com



DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	
1. Kebijakan dan Strategi	9
2. Kebijakan, Strategi dan Tujuan Pengembangan Perbenihan Perikanan	11
3. Organisasi UPTD	13
4. UPTD Perbenihan Ikan Pantai	16
5. Sarana dan Prasarana UPTD BBIP	18
6. Analisis EXTAND	20
7. Analisis Kesesuaian Jenis Produk Pilihan	21
8. Analisis SWOT	21

B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Berpikir	25
D. Operasionalisasi Variabel.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	30
B. Populasi dan Sampel	30
C. Instrumen Penelitian	31
D. Prosedur Pengumpulan Data	32
E. Metode Analisis Data	33
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	37
B. Hasil	45
C. Pembahasan	51
1. Evaluasi Kondisi Eksisting dan Peluang Pengembangan UPTDBBIP Masika Jaya	51
2. Analisis Kesesuaian Pengembangan Jenis ProdukPilihan pada UPTD BBIP Masika Jaya	65
3. Strategi Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya	71
4. Strategi Prioritas, Program dan Kegiatan	75
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
3.1.	Tabel Analisis Kesesuaian Jenis Produk Pilihan	35
3.2.	Tabel Matriks SWOT	36
4.1.	Tabel Kondisi Sarana Dan Prasarana Terkini Pada UPTD BBIP Masika Jaya	42
4.2.	Tabel Keadaan Pegawai pada BBIP Masika Jaya berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
4.3.	Tabel Karakteristik Responden	46
4.4.	Tabel Analisis EXTAND	47
4.5.	Tabel Analisis Kesesuaian Jenis Produk Pilihan di UPTD BBIP Masika Jaya	49
4.6.	Tabel Jumlah Produksi Telur, Benih dan Induk Ikan Kerapu pada UPTD BBIP Masika Jaya	65
4.7.	Tabel Matriks Analisis SWOT	71
4.8.	Tabel Urutan Strategi Prioritas Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya	75
4.9.	Tabel Roadmap Rencana Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya Periode 2015 – 2019	78

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1.	Kerangka Pikir Penelitian	26
4.1.	Lokasi UPTD BBIP Masika Jaya dilihat dari Foto Udara	38
4.2.	Posisi BBIP Masika Jaya Secara Aksesibilitas	39
4.3.	Struktur Organisasi UPTD BBIP Masika Jaya sesuai Pergub Nomor: 49 Tahun 2009	40
4.4.	Layout Rencana Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya 2015-2019	82



DAFTAR GRAFIK

Nomor	Judul	Halaman
4.1.	Perbandingan Asal dan Tingkat Pendidikan Responden	46
4.2.	Kondisi EXTAND UPTD BBIP Masika Jaya saat ini	52
4.3.	Analisis Kesesuaian Pengembangan Jenis Produk Pilihan	69



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Instrumen Penelitian	88
2.	Pedoman Wawancara	89
3.	Pedoman Observasi	90
4.	Data/Informasi Hasil Sebaran Kuesioner	91
5.	Data/Informasi Hasil Observasi	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perikanan budidaya menduduki posisi dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengembangan perikanan budidaya saat ini menjadi sangat mendesak, karena kecenderungan terjadinya peningkatan permintaan ikan konsumsi baik oleh masyarakat regional maupun global. Untuk memenuhi permintaan tersebut tidak dapat diandalkan dari perikanan tangkap saja. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya, penduduk dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai jumlah 7,8 milyar dengan asumsi konsumsi ikan perkapita 19, 1 kg/tahun. Hal ini setara dengan penyediaan ikan sebanyak 149 juta ton/tahun. Hasil tangkapan di alam hanya dapat memenuhi kebutuhan ikan tersebut sebanyak 100 juta ton. Sisanya sebanyak 49 juta ton, harus dipenuhi dari hasil pembudidayaan (Pusat Riset Perikanan Budidaya, 2006).

Lajunya *overfishing* pada daerah-daerah penangkapan ikan di laut, akan mengancam kelestarian sumberdaya ikan sehingga lambat laun produksi ikan dari kegiatan penangkapan akan semakin menurun. Dengan demikian kegiatan budidaya akan menjadi salah satu alternatif yang tepat dalam menjawab persoalan tersebut. Disamping itu, kebutuhan manusia akan ikan sebagai salah satu sumber bahan pangan terbesar menjadikan budidaya diprediksi akan berkembang pesat dikemudian hari. Terkait dengan hal tersebut maka kebutuhan akan benih yang unggul dan berkualitas menjadi suatu tuntutan yang harus terpenuhi. Untuk itulah

maka peran dan fungsi BBI dalam mendukung ketersediaan benih ikan yang unggul sangat dibutuhkan.

Secara historis, BBI hanya melekat pada komoditas ikan air tawar. Namun beberapa tahun belakangan ini, telah dibangun balai benih untuk ikan air payau dan laut yang diberi nama Balai Benih Ikan Pantai. Secara struktural, keberadaan BBI biasanya dibawah Dinas Perikanan. Secara fungsional, BBI bekerja sama dengan Balai UPT Ditjen Perikanan Budidaya dan Lembaga Penelitian yang mensuplai induk ikan dan memberikan bimbingan teknis, sedangkan BBI merupakan penyedia kebutuhan benih bagi masyarakat pembudidaya di daerahnya. Dengan struktur dan fungsi tersebut, pada dasarnya BBI memiliki peluang untuk menjadi acuan teknis budidaya bagi masyarakat sekaligus juga dapat menjadi barometer perkembangan budidaya perikanan di daerah yang bersangkutan.

Pada kenyataannya, banyak BBI yang tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Meskipun kendala di setiap daerah dapat berbeda, namun tampaknya penyebab utama dari kurang optimalnya peran BBI adalah akibat kurang maksimalnya manajemen balai, mulai dari perencanaan pembangunan hingga operasionalnya. Tahun 2010 adalah momentum untuk meningkatkan produk kelautan dan Perikanan. Oleh sebab itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merumuskan visi dan misi serta membuat *Grand Strategy* untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah menjadikan Indonesia penghasil produk Kelautan dan Perikanan terbesar di dunia pada tahun 2015, sedangkan Misi yang diemban adalah mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. Demi mewujudkan visi dan misi tersebut,

maka KKP mempercepat peningkatan produksi perikanan budidaya hingga 353%, yaitu dari 4,7 juta ton pada tahun 2009 menjadi 16,8 juta ton pada tahun 2014 (KKP, 2010).

Dalam rangka mempercepat peningkatan produksi tersebut, maka pengembangan perikanan budidaya di Maluku khususnya budidaya air laut yang tentunya akan mengacu pada Visi Dirjen Perikanan Budidaya yaitu *“Perikanan budidaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi andalan melalui sistem usaha budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan dan misi “Memproduksi ikan secara efisien dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, melaksanakan pembangunan perikanan budidaya berbasis IPTEK yang bertanggungjawab dan ramah lingkungan, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta menciptakan iklim usaha yang kondusif”* sudah pasti harus dioptimalkan (DJPB-Direktorat Perbenihan, 2010).

Pengembangan usaha perikanan budidaya antara lain sangat tergantung pada ketersediaan induk dan benih unggul. Oleh karena itu proses penyediaan dan distribusi benih unggul harus memenuhi tujuh kriteria yang telah ditetapkan yaitu tepat jenis, waktu, mutu, jumlah, tempat, ukuran dan harga, guna mendukung maju dan berkembangnya usaha perikanan budidaya (Dirjen Perikanan Budidaya, 2010). Salah satu instansi yang diharapkan seharusnya dapat berperan maksimal sebagai penyedia induk unggulan dan benih bermutu adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Sebagai salah satu UPTD milik Pemerintah yang ada di Maluku, UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Masika Jaya sesungguhnya

perlu dikembangkan guna memenuhi ketersediaan bahan pangan hewani, peningkatan pendapatan pembudidaya ikan laut, penyediaan lapangan kerja dan usaha serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyediaan benih yang bermutu secara kualitas dan kuantitas secara berkesinambungan.

Sebagai salah satu UPTD milik Pemerintah Provinsi, UPTD BBIP Masika Jaya sebenarnya memiliki peluang pengembangan yang menjanjikan. Selain karena faktor pasar nasional bahkan internasional yang menjanjikan, kebutuhan benih unggul untuk menunjang usaha budidaya ikan laut pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku sendiri dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan dan perkembangan yang meningkat. Disamping itu, Letak UPTD BBIP Masika Jaya sendiri yang berlokasi di Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat) sebenarnya memungkinkan untuk mensuplai benih ke seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Maluku.

Pada tahun 2007 UPTD BBIP Masika Jaya telah mampu menyediakan benih ikan khususnya ikan kerapu sebanyak \pm 500 ekor. Namun karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk penampungan, maka benih-benih ikan tersebut ditebar ke laut. Disamping itu, tahun 2011 sampai dengan 2013 telah berhasil pula memproduksi telur dengan puncak produksi pada tahun 2013 yaitu sebanyak \pm 70 juta telur. Namun karena kendala yang sama maka proses tersebut tidak bisa berlanjut ke tingkat benih (Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan UPTD BBIP Masika Jaya, 2013).

Melihat dari tingginya permintaan terhadap suplai benih ikan unggul dari UPT BBL Waiheru (salah satu UPT Pusat Ditjen Perikanan Budidaya di Maluku) selama beberapa tahun terakhir, khususnya benih ikan kerapu yang disuplai ke

hampir seluruh kawasan di Indonesia bahkan sampai ke Singapura dan Hongkong (*Data UPT BBL Waiheru, 2010*) maka sebenarnya peluang pasar bagi perdagangan benih ikan kerapu sesungguhnya sangat menjanjikan. Namun karena terkendala oleh berbagai masalah seperti kondisi dan kualitas SDM, persoalan sarpras, manajemen kelembagaan serta berbagai masalah lainnya yang membutuhkan penanganan yang lebih serius, peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu secepatnya harus direncanakan kebijakan-kebijakan strategis yang tepat dalam pemecahan berbagai permasalahan tersebut agar UPTD BBIP Masika Jaya dapat beroperasi secara maksimal.

Salah satu persoalan mendasar yang menjadi sumber dari berbagai permasalahan dalam upaya pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya yang dihadapi saat ini adalah sangat terbatasnya dukungan kebijakan (*policy*) dan kemauan Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri dalam pengembangan institusi BBIP ini. Selama ini terkesan kebijakan DKP Provinsi Maluku dalam bentuk program dan kegiatan pada UPTD BBIP Masika Jaya sangat tidak maksimal dan tidak efektif/tepat sasaran. Padahal Kebijakan adalah salah satu unsur vital dalam mendukung pengembangan suatu institusi. Kebijakan merupakan landasan untuk melakukan tindakan-tindakan nyata dilapangan. Kebijakan ada pada setiap lembaga atau organisasi yang dapat diturunkan dalam bentuk strategi, rencana, peraturan, kesepakatan, konsensus dan kode etik, program dan proyek. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses pembuatannya dan pelaksanaannya (Dunn, 1994).

Bila dianalisis secara lebih mendalam, suksesnya pembangunan Kelautan dan Perikanan bidang budidaya perikanan khususnya budidaya ikan kerapu di

Provinsi Maluku seharusnya tidak terlepas dari keberadaan dan peranan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BBIP Masika Jaya sebagai unit pengkajian dan pengembangan teknologi budidaya ikan untuk menghasilkan paket teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan dengan spesifik lokal serta menghasilkan calon induk dan benih ikan yang bermutu. Untuk itulah maka upaya peningkatan fungsi dan peranan UPTD BBIP Masika Jaya dipandang sebagai sebuah kebijakan dan langkah strategis dalam mendukung pengembangan dan kemajuansub sektor perikanan budidaya yang diharapkan nantinya akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan laju pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku.

Guna meningkatkan kinerja UPTD BBIP Masika Jaya, khususnya dalam rangka mendukung program Revitalisasi Perikanan Budidaya dalam pencapaian target peningkatan produksi perikanan budidaya dalam mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, maka sudah barang tentu dibutuhkan strategi yang tepat dalam mengembangkan UPTD BBIP Masika Jaya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan coba dirumuskan secara tepat strategi pengembangan UPTD BBIP Maska Jaya.

B. Perumusan Masalah

Pada dasarnya permasalahan yang ditemukan pada sebagian besar balai benih ikan (BBI) Pantai milik pemerintah daerah hampir sama sehingga berakibat pada tidak berfungsinya BBI secara optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UPTD BBIP Masika Jaya antara lain :

- Perencanaan Pembangunan tidak sesuai dengan standar BBIP yang ideal khususnya kondisi sarana prasarana pokok, pendukung, penunjang, pengaman dan pelengkap.
- Komoditas dan jenis produk yang dikembangkan tidak mempertimbangkan faktor kondisi *eksisting* balai, daya dukung kawasan/perairan dan pasar sehingga dapat diarahkan untuk kegiatan budidaya ikan yang bernilai jual tinggi (ekonomis).
- Keterbatasan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) khususnya untuk tenaga profesional.

Dengan demikian maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi *eksisting* (saat ini) dan peluang pengembangan UPTD BBIPMasika Jaya kedepan jika ditinjau dari standarisasi pembangunan sebuah UPT Balai Benih Ikan Pantai pada kondisi ideal ?
2. Komoditi dan jenis produk apa saja yang sesuai untuk dikembangkan pada UPTD BBIPMasika Jaya saat ini, dilihat dari kemampuan produksi, daya dukung sarpras, kawasan dan SDMserta permintaan konsumen yang ada di Maluku maupun di Indonesia ?
3. Strategi apa saja yang dapat ditempuh dalam mendukung pengembangan UPTD BBIPMasika Jaya sebagai UPTD milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi kondisi *eksisting* dan peluang pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya.
2. Menganalisis komoditi dan jenis produk yang sesuai untuk dikembangkan di UPTD BBIP Masika Jaya.
3. Merumuskan strategi pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kajian informasi menyangkut kondisi UPTD BBIP Masika Jaya saat ini.
2. Sebagai pertimbangan pemerintah dalam mengupayakan pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya di masa yang akan datang dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait.
3. Sebagai informasi dan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan upaya pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya khususnya dan BBIP lainnya di waktu yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan adalah salah satu unsur vital dalam organisasi atau lembaga baik itu lembaga pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, LSM, donor atau lembaga internasional, bahkan dalam keluarga atau institusi informal sekalipun. Kebijakan merupakan landasan untuk tindakan-tindakan nyata di lapangan. Kebijakan ada pada setiap lembaga atau organisasi yang dapat diturunkan dalam bentuk strategi, rencana, peraturan, kesepakatan, konsensus dan kode etik, program dan proyek. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses pembuatannya dan pelaksanaannya.

Analisis kebijakan sebagai ilmu pengetahuan juga memerlukan pendekatan multidisipliner dan pengembangannya memerlukan pendekatan lintas sektoral. Artinya kebijakan di satu sektor harus memperhatikan implikasinya bagi kegiatan atau dampak di sektor lain. Namun dalam kenyataannya kebijakan lintas sektoral sulit dikembangkan karena masing-masing sector akan mempunyai strategi, program, proyek dan anggaran terpisah serta tidak ada sektor yang mau dipimpin atau dikelola oleh sector lain. Teori kelembagaan, ilmu kebijakan (*policy sciences*) merupakan ilmu yang multidisiplin, berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan. Ilmu ini dirancang untuk menyoroti masalah-masalah fundamental yang muncul ketika warga negara dan pembuat kebijakan (*policy maker*) melihat perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik dan membuat kebijakan untuk mencapai tujuan publik (Dunn, 1994).

a. Pengertian kebijakan

Kebijakan adalah jalan atau cara bagi lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik (dalam hal ini pemerintah) untuk mengatasi suatu permasalahan atau sekelompok permasalahan yang saling berhubungan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan adalah cara atau jalan yang dipilih pemerintah untuk mendukung suatu aspek dari ekonomi termasuk sasaran yang pemerintah cari untuk mencapainya dan pemilihan metode untuk mencapai tujuan dan sasaran itu. Defenisi lain menyatakan bahwa kebijakan adalah tindakan apapun yang dipilih pemerintah perlu untuk dilakukan ataupun kegiatan yang dipilih secara sengaja oleh aktor tertentu atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu masalah. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dan pejabatnya (Imran, Ali. 2002)

Dari berbagai defenisi kebijakan baik yang sederhana maupun yang kompleks kemudian dihimpun unsur-unsur utama didalamnya sehingga dapat dibuat defenisi sebagai berikut: "Kebijakan adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya dilapangan dengan menggunakan instrument tertentu"

b. Pengertian strategi

Pengertian strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Dijelaskan pula bahwa pengertian strategi secara umum adalah proses penentuan

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan pengertian strategi secara khusus adalah merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa mengikat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan (Bagus, 2012).

Selanjutnya dirumuskan strategi dalam beberapa langkah yaitu (1). Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki dimasa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut; (2). Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman; (3). Merumuskan factor-faktor ukuran keberhasilan dan strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; (4). Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi dan; (5). Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang (Bagus, 2012).

2. Kebijakan, Strategi dan Tujuan Pengembangan Perbenihan Perikanan

a. Kebijakan Pengembangan Perbenihan Nasional

Kebijakan pengembangan perbenihan nasional dilaksanakan dengan mengacu pada visi, misi dan arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya nasional meliputi :

- 1) Percepatan produksi perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor (PROPEKAN); dengan fokus kebijakan peningkatan daya saing produk

perikanan melalui pengembangan dan penguatan penerapan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.

- 2) Percepatan produksi perikanan budidaya untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat (PROKSIMAS); dengan focus kebijakan diversifikasi komoditas budidaya yang mudah dikembangkan melalui pengembangan komoditas spesifik lokan dan pemanfaatan kolam pekarangan masyarakat.
- 3) Perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya perikanan budidaya (PROLINDA); dengan focus kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya secara terkendali melalui peningkatan kepedulian masyarakat pembudidaya ikan dalam pelestarian ekosistem sumberdaya perikanan budidaya.

b. Strategi Pengembangan Perbenihan Nasional

Strategi pengembangan perbenihan nasional yang sedang dilaksanakan adalah dengan maksud menggiatkan pembangunan perikanan budidaya secara terpadu sehingga dapat menggenjot produksi. Untuk mensukseskan rencana tersebut maka tentunya dibutuhkan pemenuhan terhadap beberapa komponen penting yang terkait didalamnya antara lain adalah :

- 1) Penyediaan benih bermutu dan induk unggul;
- 2) Kemudahan distribusi benih atau bibit serta sarana produksi bidang perikanan budidaya;
- 3) Penciptaan iklim investasi dan permodalan yang kondusif untuk perbenihan serta memfasilitasi penyediaan jaringan infrastruktur;
- 4) Penerapan standar produksi perbenihan yang baik dan benar sesuai kaidah cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);

perikanan melalui pengembangan dan penguatan penerapan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.

- 2) Percepatan produksi perikanan budidaya untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat (PROKSIMAS); dengan focus kebijakan diversifikasi komoditas budidaya yang mudah dikembangkan melalui pengembangan komoditas spesifik lokan dan pemanfaatan kolam pekarangan masyarakat.
- 3) Perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya perikanan budidaya (PROLINDA); dengan focus kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya secara terkendali melalui peningkatan kepedulian masyarakat pembudidaya ikan dalam pelestarian ekosistem sumberdaya perikanan budidaya.

b. Strategi Pengembangan Perbenihan Nasional

Strategi pengembangan perbenihan nasional yang sedang dilaksanakan adalah dengan maksud menggiatkan pembangunan perikanan budidaya secara terpadu sehingga dapat menggenjot produksi. Untuk mensukseskan rencana tersebut maka tentunya dibutuhkan pemenuhan terhadap beberapa komponen penting yang terkait didalamnya antara lain adalah :

- 1) Penyediaan benih bermutu dan induk unggul;
- 2) Kemudahan distribusi benih atau bibit serta sarana produksi bidang perikanan budidaya;
- 3) Penciptaan iklim investasi dan permodalan yang kondusif untuk perbenihan serta memfasilitasi penyediaan jaringan infrastruktur;
- 4) Penerapan standar produksi perbenihan yang baik dan benar sesuai kaidah cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);

perbenihan perikanan berdasarkan fungsi, kegiatan, status dan jenis komoditas ikan yang dikembangkan sesuai bidang tugas yaitu UPTD Perbenihan Ikan Pantai.

a. Lokasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

UPTD bidang perbenihan perikanan merupakan institusi sarana bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu induk kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) dalam rangka produksi benih bermutu.

1) Lokasi UPTD Perbenihan Perikanan

UPTD Bidang Perbenihan Perikanan berlokasi di wilayah kerja masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota dengan jumlah minimal 1 (satu) unit untuk setiap bidang (UPTD Air Tawar, UPTD Air Payau/Laut) sesuai potensi sumberdaya perikanan yang ada.

2) Kedudukan UPTD Bidang Perbenihan Perikanan

UPTD Bidang Perbenihan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang perbenihan ikan, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota. UPTD Bidang Perbenihan Perikanan memiliki Eselonisasi dan berkewenangan mengelola anggaran sendiri. UPTD Bidang Perbenihan Perikanan merupakan Institusi yang kelembagaannya berkedudukan di lokasi unit produksi.

3) Tugas

UPTD Bidang Perbenihan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu induk dan benih unggul serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

4) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, baik UPTD pembenihan ikan pantai Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi: Penyediaan/perbanyakandan distribusi induk unggul, Penerapan teknik perbenihan, Pelaksanaan produksi dan distribusi benih, Pengendalian mutu benih melalui penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan penerapan system jaminan mutu perbenihan, Diseminasi penerapan teknik pembenihan ke masyarakat;Pelaporan dan perbaikan data statistik perbenihan secara berkala;Pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;

5) Susunan Organisasi Minimal

Mengacu pada PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, UPTD Pembenihan Ikan Pantai terdiri dari :Kepala, Ketatausahaan, Fungsi Pelaksana Produksi, Fungsi Pelaksana Distribusi, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun susunan Struktur Organisasi UPTD sebagai berikut :

a) Kepala UPTD, mempunyai tugas memimpin, merencanakan dan mengkoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan segala kegiatan UPTD sesuai dengan tujuan dan sasaran yang meliputi :

- Menyusun rencana kerja dan rencana operasional
- Melaksanakan bimbingan
- Menyusun laporan
- Bertanggungjawab kepada kepala dinas

- b) Ketatausahaan, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan UPTD Pembenihan ikan air tawar/payah/laut yang antara lain pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, persuratan dan rumah tangga.
- c) Fungsi Pelaksana Produksi, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan publikasi teknis kegiatan penerapan teknik pembenihan, pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan, pengendalian hama penyakit serta melakukan penerapan CPIB dan pelaksanaan sertifikasi system mutu perbenihan.
- d) Fungsi Pelaksana Distribusi, mempunyai tugas melakukan administrasi proses produksi, pemasaran dan pengawasan benih kepada pembudidaya serta evaluasi proses produksi.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional, antara lain perekayasa, litkayasa, pengawas benih, penyuluh dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah tenaga pengelola UPTD minimal 30 orang dengan pendidikan dan ketrampilan yang memadai, disertai dengan pelatihan-pelatihan teknis secara berkala.

4. UPTD perbenihan ikan pantai (BBIP)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan yang berada dibawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, bertugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan ikan, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk, penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, teknik

pengendalian hama dan penyakit, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu perbenihan.

Agar UPTD dapat berfungsi optimal, maka UPTD perlu didukung dengan dana operasional yang memadai, SDM yang kompeten, prasarana/sarana fisik yang sesuai standar rancang bangun serta adanya standar prosedur operasional yaitu sebuah standar pengelolaan dan teknis operasional pembenihan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) Perbenihan Perikanan.

Adapun beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi dalam pembangunan / pengembangan UPTD (BBI) menurut Sutisna dan Sutarmanto (1995), adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan / pengembangan BBI adalah sebagai berikut :

- 1) Lahan merupakan aset Pemerintah Daerah setempat dengan status peruntukan yang jelas sesuai RUTR Daerah;
- 2) Perencanaan, pembangunan dan pengembangan UPTD Perbenihan, dilaksanakan berdasarkan skala prioritas sesuai kebutuhan dengan memperhatikan potensi sumberdaya yang tersedia.
- 3) Penetapan status Kelembagaan UPTD Perbenihan Perikanan melalui SK Gubernur/Bupati/Walikota setempat.
- 4) Penyediaan anggaran pembangunan / pengembangan dan operasional UPTD.

b. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis lokasi (lahan dan air) antara lain sebagai berikut :

- 1) Memiliki sumber air yang memadai, tersedia sepanjang tahun, bebas bakteri pathogen, bebas logam berat dan sesuai untuk kebutuhan kegiatan pembenihan/budidaya ikan serta bebas banjir.
- 2) Luas lahan minimal untuk UPTD Provinsi adalah 5 Ha dan untuk UPTD Kabupaten/Kota adalah 2 Ha.
- 3) Akses mobilitas dari dan ke lokasi UPTD terbuka dan mudah.
- 4) Pasokan listrik dapat terpenuhi.
- 5) Kemiringan lahan yang ideal 1 s/d 5%.
- 6) Struktur tanah padat dan tidak berbatu sehingga dapat menampung air (tidak porous) dan subur, tekstur tanah umumnya terdiri dari tanah liat dan liat berpasir.

5. Sarana dan prasarana UPTD BBIP

Sarana dan prasarana UPTD (BBI) yang terdiri dari unit produksi benih, produksi induk, unit pemasaran, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, unit diseminasi teknologi terapan dan keperluan lainnya, dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok yaitu :

- 1) Sarana dan Prasarana Pokok;
- 2) Sarana dan Prasarana Pendukung;
- 3) Sarana dan Sarana Penunjang;
- 4) Sarana dan Sarana Pengaman; dan
- 5) Sarana dan Prasarana Pelengkap.

Lebih lengkap penjelasan pengelompokan persyaratan teknis sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Sarana dan prasarana pokok

Sarana dan prasarana pokok di UPTD adalah bangunan dan sarana yang harus ada dan terkait langsung dengan proses produksi, meliputi fasilitas perkolaman dan bahan-bahan pembenihan.

b. Sarana dan prasarana pendukung

Bangunan sarana dan prasarana pendukung merupakan kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi untuk mempermudah, mempercepat, memperkecil biaya proses produksi dan penanganan benih dengan baik di UPTD yang mencakup: unit administrasi (kantor), jaringan jalan komplek, jaringan saluran drainase air hujan dan air limbah, rumah pimpinan, rumah karyawan, bengkel kerja (*workshop*), laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, sarana cuci tangan, *footbatch* (*biosecurity* dari perantara kaki) serta *carbath* (*biosecurity* dari perantara ban/roda mobil), kualitas air, gudang peralatan, bangunan unit pembuatan pakan, system penyediaan air bersih, serta ditunjang dengan peralatan kantor, peralatan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, alat distribusi bahan baku dan mesin produksi pakan.

c. Sarana dan prasarana penunjang

Bangunan sarana dan prasarana penunjang merupakan kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi untuk melengkapi fasilitas Balai Perbenihan yang dibangun sesuai dengan misinya baik untuk UPTD, yang meliputi: *showroom* benih/benur, tempat packing distribusi benih, tempat pelatihan, rumah tamu (*guest*

house), gedung pertemuan, fasilitas olahraga, jaringan listrik lingkungan, pertamanan (*land scapping*), ruang ibadah, perpustakaan dan jalan lingkungan.

d. Sarana dan prasarana pengaman

Bangunan sarana dan prasarana pengaman, merupakan kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi sebagai pengaman terhadap fasilitas Balai Perbenihan dari pencurian maupun kerusakan karena kondisi alam. Bangunan pengaman tersebut seperti : dinding penahan gelombang, tanggul, pos jaga, pagar lingkungan, perlengkapan pengaman, penangkal petir dan tabung pemadam kebakaran.

e. Sarana dan prasarana pelengkap

Bangunan sarana dan prasarana pelengkap merupakan kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi sebagai pelengkap bangunan pokok, bangunan pendukung, bangunan penunjang dan bangunan pengaman agar dapat berfungsi secara optimal. Bangunan pelengkap tersebut antara lain : gudang pakan, rumah pompa, rumah genset, rumah blower dan meubelair.

Tata letak seluruh fasilitas UPTD Perbenihan Ikan Pantai harus diatur sedemikian rupa dan menunjukkan dimensi yang tepat sehingga lahan dan fasilitas yang tersedia dapat digunakan seoptimal mungkin, yang pada gilirannya dapat memudahkan pekerjaan sehari-hari dan menekan biaya operasional.

6. Analisis EXTAND

Analisis EXTAND menurut Abrahamsz (2010) merupakan analisis kondisi yang membandingkan Kondisi Eksisting dan Kondisi Standar (disingkat EXTAND). Analisis EXTAND didasarkan pada nilai dengan kisaran ≤ 1 dan ≥ 1 yang diekspresikan secara tabular. Kisaran nilai yang diperoleh dari setiap

variabel yang diukur menggambarkan eksistensi parameter dari variabel yang diukur.

7. Analisis Kesesuaian Jenis Produk Pilihan

Analisis kesesuaian jenis produk pilihan didasarkan pada beberapa komponen penilaian/pengukuran dengan mengacu pada data produksi beberapa jenis produk pada suatu unit usaha dan perkembangannya selama 5 (lima) tahun atau lebih. Analisis ini didasarkan pada kisaran nilai *tinggi* (T) = 3, *sedang* (S) = 2 dan *rendah* (R) = 1 dimana rekapan total nilai tertinggi menunjukkan jenis produk yang seharusnya menjadi prioritas.

8. Analisis SWOT

Penggunaan analisis SWOT menurut Rangkuti (2006) sebenarnya telah muncul sejak ribuan tahun yang lalu dari bentuknya yang paling sederhana, yaitu dalam rangka menyusun strategi untuk mengalahkan musuh dalam setiap pertempuran, sampai menyusun strategi untuk memenangkan persaingan bisnis, dengan konsep menang-menang atau *cooperation* dan *competition*. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep dasar SWOT adalah pendapat Sun Tzu, bahwa “apabila kita telah mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, sudah dapat dipastikan bahwa kita dapat memenangkan pertempuran”.

Analisis SWOT merupakan analisis yang mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan

kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan (Rangkuti, 2006). Lebih lanjut dikatakan bahwa proses penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap, yaitu : tahap pengumpulan data, tahap analisis dan tahap pengambilan keputusan.

Tahap pengumpulan data, menurut Rangkuti (2006), tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Model yang dapat dipergunakan adalah : matriks TOWS atau SWOT, matriks BCG, matriks internal eksternal, matriks SPACE, dan matriks *Grand Strategy*.

B. Penelitian Terdahulu

1. Judul Penelitian : Kajian Stategis Pengembangan PPN Tual oleh Ir. Jance Wenno, 2012. Analisis data pada penelitian ini menggunakan empat metode analisis yaitu analisis statistik deskriptif, analisis EXTAND, analisis kinerja dan analisis SWOT dengan hasil penelitian adalah :
 - a. Kondisi PPN Tual sesuai syarat teknis pelabuhan dengan klasifikasi PPN hampir seluruhnya telah terpenuhi, kecuali beberapa syarat yang membutuhkan upaya-upaya pengembangan.
 - b. Kinerja PPN Tual menunjukkan penurunan dalam 3 tahun terakhir dan membutuhkan upaya-upaya peningkatan

- c. Strategi pengembangan PPN Tual terkelompokkan dalam empat skenario, yakni skenario mobilisasi sebanyak lima strategi, skenario diversifikasi sebanyak empat strategi, skenario investasi sebanyak lima strategi dan skenario pengembangan kapasitas sebanyak tiga strategi.
2. Judul Penelitian : Strategi Pengembangan Pembenihan Ikan Patin (*Pangasius hypophthalmus*) di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor oleh Tubagus Yudi Imawan, 2014. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT yang dirinci dengan matriks evaluasi faktor internal dan eksternal serta analisis QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*) dengan hasil penelitian adalah :
 - a. Gambaran menyangkut faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta pembobotannya.
 - b. Diperoleh 7 alternatif strategi pengembangan dan strategi pengembangan kemitraan usaha dipilih sebagai strategi dengan TAS tertinggi.
 3. Judul Penelitian : Strategi Pengembangan Perikanan Tambak Sebagai Sub Sektor Unggulan di Kabupaten Sidoarjo, oleh Umi Barokah, 2010. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis klasifikasi komoditi perikanan tambak dengan pendekatan tipologi *Klassen* dan analisis SWOT dengan hasil penelitian adalah :
 - a. Mengkategorikan perikanan tambak di Kabupaten Sidoarjo atas komoditi potensial dan komoditi terbelakang.
 - b. Menghasilkan enam alternatif strategi pengembangan berupa pengaplikasian CBIB, pembenihan skala rumah tangga, penanggulangan hama dan penyakit, peningkatan kualitas air, peningkatan akses

permodalan dan informasi pasar serta peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat pembudidaya.

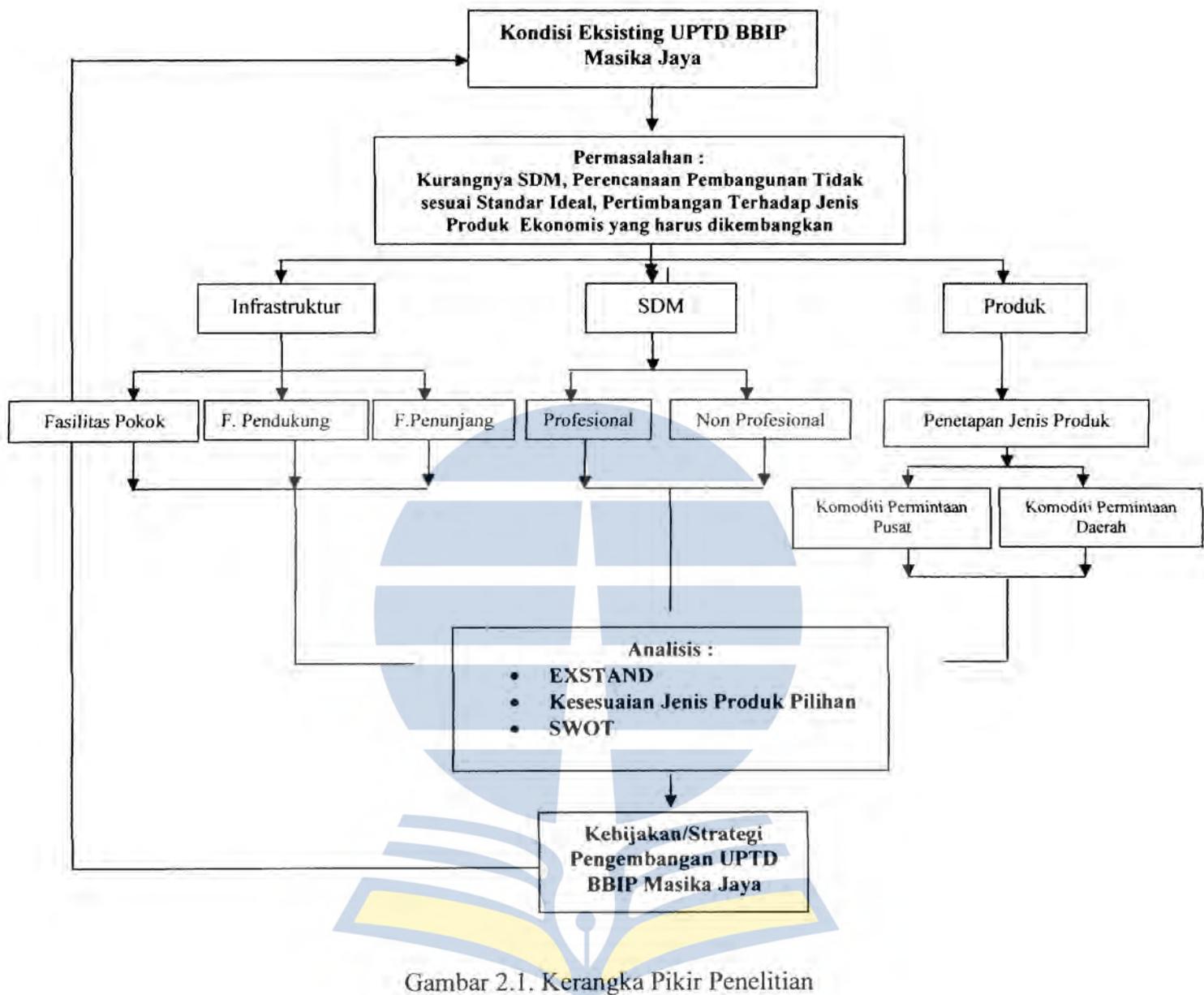
4. Judul Penelitian : Staregi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Yapen Provinsi Papua oleh Karsudi, Rinekso Sukmadi dan Hariadi Kartodihaardjo, 2010. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis penawaran permintaan dan analisis prospektif dengan hasil penelitian adalah :
 - a. Sebagian besar objek wisata di Kabupaten Yapen layak untuk dikembangkan dalam konsep ekowisata, namun ada beberapa kawasan yang belum layak dikembangkan karena permasalahan aksesibilitas, pelayanan yang belum sesuai standar serta akomodasi yang tidak memenuhi persyaratan.
 - b. Strategi dan upaya pengembangannya adalah melalui upaya peningkatan pemasaran dan promosi, memperkecil kendala aksesibilitas, peningkatan pelayanan sesuai standar, pemenuhan standar akomodasi dan peningkatan diversifikasi atraksi wisata, pengembangan regulasi dan organisasi pengelola serta penciptaan situasi keamanan yang kondusif.
5. Judul Penelitian : Analisis Strategi Peningkatan Kinerja Bagian Sekretariat Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai oleh Rahmawati Halim, 2014. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis manajemen yang berisikan serangkaian metode analisis yaitu analisis kesenjangan kinerja organisasi, analisis *brainstorming*, diagram pareto, metode komparasi, USG, diagram pohon masalah, SWOT dan teknis penyusunan rencana kegiatan (5 W + 1 H) dengan hasil penelitian adalah berupa serangkaian alternatif strategi yang dikelompokan dalam strategi SO

(*strength opportunities*), strategi WO (*weaknesses opportunitie*), strategi ST (*strength treats*) dan strategi WT (*weaknesses treats*).

C. Kerangka Berpikir

UPTD BBIP Masika Jaya merupakan salah satu UPTD milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku yang diharapkan berfungsi sebagai penghasil benih dan induk unggul. UPTD BBIP Masika Jaya juga bertugas untuk melakukan pembinaan dan pemantauan penerapan teknologi perbenihan, upaya pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan, serta memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut akan lebih efisien dan efektif bila didukung dengan dukungan program dan kebijakan DKP Provinsi Maluku guna menopang keberadaansarpras dan infrastruktur, sumberdaya manusia (SDM) serta sumberdaya alam (SDA) dalam hal ini yaitu ketersediaan induk unggul dan benih unggul yang berkualitas.

Ketiga hal tersebut diatas merupakan sebuah sinergi yang akan mendukung kinerja sebuah UPTD. Oleh sebab itu ketiga faktor diatas perlu diketahui secara pasti dan jelas, menyangkut permasalahan serta potensi yang ada saat ini sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan sebuah kebijakan guna mendukung pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya kedepan.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

D. Operasionalisasi Variabel

1. Strategi Pengembangan adalah upaya untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan kawasan baik internal yang meliputi kelemahan dan kekuatan maupun kondisi lingkungan eksternal yang meliputi peluang dan ancaman, dimana selanjutnya akan diambil suatu alternative untuk menentukan strategi yang harus diambil/dikembangkan.

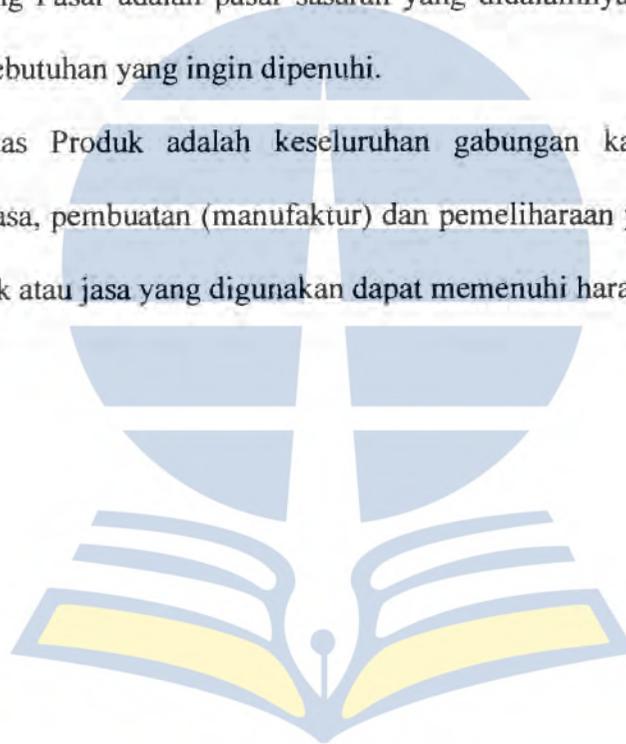
2. UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah suatu unit kerja dibawah pengawasan dan pengelolaan Dinas Perikanan atau Dinas yang membidangi Perikanan baik di Provinsi, Kabupaten, maupun Kota, yang melaksanakan tugas operasional teknis dibidang pembangunan perikanan.
3. BBIP/Balai Benih Ikan Pantai adalah Unit Pelaksana Teknis bidang Perbenihan yang berada dibawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan ikan, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyak dan distribusi induk, penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, teknik pengendalian hama dan penyakit, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu perbenihan.
4. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
5. Benih Bermutu adalah benih yang dihasilkan melalui proses produksi yang baik dan benar, yang dicirikan oleh beberapa karakteristik antara lain pertumbuhan cepat, seragam, sintasan tinggi, adaptif terhadap lingkungan pembesaran, bebas parasit dan tahan terhadap penyakit, efisien dalam menggunakan pakan serta tidak mengandung residu bahan kimia dan obat-obatan yang dapat merugikan bagi manusia dan lingkungan.
6. Cara Pembenihan Ikan yang Baik adalah cara mengembang biakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi persyaratan *biosecurity*, mampu

telusur (*traceability*) dan keamanan pangan (*food safety*).

7. Sarana dan Prasarana Pokok adalah bangunan dan sarana yang harus ada dan terkait langsung dengan proses produksi.
8. Sarana dan Prasarana Pendukung adalah kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi untuk mempermudah, mempercepat, memperkecil biaya proses produksi dan penanganan benih dengan baik di UPTD.
9. Sarana dan Prasarana Penunjang adalah kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi untuk melengkapi fasilitas Balai Perbenihan yang dibangun sesuai dengan misinya baik untuk UPTD.
10. Sarana dan Prasarana Pengaman adalah kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi sebagai pengaman terhadap fasilitas Balai Perbenihan dari pencurian maupun kerusakan karena kondisi alam.
11. Sarana dan Prasarana Pelengkap adalah kelompok bangunan yang keberadaannya berfungsi sebagai pelengkap bangunan pokok, bangunan pendukung, bangunan penunjang dan bangunan pengaman agar dapat berfungsi secara optimal.
12. Luas lahan adalah luas areal suatu kawasan balai sesuai peruntukan yang dapat menampung keberadaan infrastruktur, sarana prasarana dan menunjang pelaksanaan manajemen dan operasional kerja balai secara efektif.
13. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya yang adaptif dan transformative yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang

terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis, sering dimengerti sebagai bagian integral dari system yang membentuk suatu organisasi (Wikipedia)

14. Komponen Penunjang Produksi adalah komponen dalam bentuk fisik dan atau material yang keberadaannya sangat diperlukan dan berpengaruh terhadap kelancaran dan hasil akhir suatu proses produksi.
15. Peluang Pasar adalah pasar sasaran yang didalamnya terdapat keinginan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi.
16. Kualitas Produk adalah keseluruhan gabungan karakteristik produk, rekayasa, pembuatan (manufaktur) dan pemeliharaan yang akan membuat produk atau jasa yang digunakan dapat memenuhi harapan konsumen.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang saya rencanakan adalah penelitian deskriptif yang disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pantai (UPTD BBIP) Masika Jaya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan Maret s/d Mei 2014.

Untuk pengambilan responden dilakukan dengan teknis *Purposive sampling* (pertimbangan) yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja, responden dipilih terhadap orang-orang yang dipandang ahli atau mengetahui secara jelas data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* dilakukan jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Hanya mereka yang ahli yang patut memberikan pertimbangan untuk pengambilan sampel yang dilakukan.

Dalam penelitian ini populasi dan sampel adalah berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan jumlah sampel sebanyak 10 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan jumlah sampel sebanyak 4 orang, UPT Loka Budidaya Laut Waiheru dengan jumlah sampel sebanyak 3 Orang, UPTD BBIP Masika Jaya dengan jumlah

sampel sebanyak 10 orang dan masyarakat pembudidaya dengan jumlah sampel sebanyak 5 orang.

C. Instrumen Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, selanjutnya dianalisis dan dikelompokkan dalam beberapa variable besar untuk selanjutnya dinilai perbandingan kondisi existing dengan kondisi ideal terkait sarpras dan SDM, jumlah dan jenis produksi yang dihasilkan untuk selanjutnya disesuaikan dengan strategi yang dipakai. Pengelompokan variabel-variabel tersebut antara lain :

1. Luas Lahan;
2. SDM (jumlah dan kualitas);
3. Sarana Air Bersih (keberadaan/kualitas instalasi dan pemenuhan kebutuhan);
4. Bak (jumlah dan kualitas);
5. Fasilitas pendukung yang ada;
6. Fasilitas Penunjang yang ada;
7. Fasilitas Pengamanan yang ada;
8. Fasilitas Pelengkap yang ada;
9. Jumlah induk unggul;
10. Jumlah Produksi Telur dan Benih;

Sedangkan terkait dengan penentuan jenis produk pilihan yang dapat dikembangkan pada UPTD BBIP Masika Jaya, akan ditampilkan data produksi tiga jenis produk yaitu telur, benih dan induk selama 5 tahun terakhir yang selanjutnya akan dianalisis peluang pengembangannya dengan menggunakan 9 komponen penilaian yaitu :

1. Dukungan Sarpras

2. Dukungan Kualitas Air
3. Dukungan Induk Unggul
4. Dukungan SDM/Skil
5. Dukungan Komponen Penunjang Produksi (Pakan, Obat, BBM)
6. Dukungan Kawasan/Perairan
7. Peluang Pasar
8. Kualitas Produk
9. Kontinuitas ketersediaan Produk

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung di lokasi penelitian, yang diperoleh dengan menggunakan beberapa cara, yaitu :

- 1). Wawancara yang sifatnya bebas terstruktur, dengan berbagai pihak terkait seperti data dan informasi yang dapat diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mengenai profil UPTD BBIP Masika Jaya, gambaran umum lokasi penelitian, potensi sumberdaya perikanan dan data produksi.

2). Angket (*Questionnaire*)

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respons sesuai dengan permintaan pengguna (Riduwan, 2004).

b. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari instansi–instansi/lembaga terkait yang sesuai dan berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelusuran pustaka hasil penelitian, jurnal dan bentuk–bentuk laporan lainnya, termasuk data dan informasi tertulis di lapangan.

E. Metode Analisis Data

Dalam menjawab ketiga tujuan penelitian, digunakan tiga analisis yang akan membantu menjawab tujuan penelitian, yang akan dijelaskan dibawah ini :

1. Analisis Deskriptif; Kondisi UPTD Balai benih ikan air pantai Masika Jaya saat ini apakah sesuai dengan standar pembangunan Balai Budidaya Ikan (BBI) yang dianjurkan (Petunjuk Teknis UPTD, 2010). Untuk menganalisa kondisi tersebut dilaksanakan **analisa perbandingan kondisi existing standard (EXTAND)** (Abrahamsz, 2010). Analisis EXTAND didasarkan pada nilai dengan kisaran ≤ 1 dan ≥ 1 yang diekspresikan secara tabular. Kisaran nilai yang diperoleh dari setiap variabel yang diukur menggambarkan eksistensi parameter dari variabel yang diukur. Pendekatan matematis yang digunakan meliputi aspek fungsi dan kerangka matematisnya. Dalam konteks aspek fungsi, model yang dikembangkan ini menunjukkan bahwa analisis perbandingan kondisi merupakan fungsi dari kondisi eksisting dan

standar. Sesuai dengan rumusan itu, Abrahamsz (2010) menunjukkan bahwa dalam konteks fungsi, Model EXTAND dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$EXTAND = f\{K_{ex}, K_{stand}\}$$

dimana EXTAND merupakan fungsi perbandingan kondisi, K_{ex} adalah kondisi eksisting, dan K_{stand} adalah kondisi standar. Fungsi matematis yang dikembangkan sebagai pengembangan dari fungsi umum tersebut menurut Abrahamsz (2010) dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$EXTAND = \frac{K_{ex}}{K_{stand}}$$

Hasil perhitungan ini menjadi dasar untuk melakukan analisis EXTAND, dimana sesuai dengan anjuran Abrahamsz (2010) bahwa terdapat tiga kondisi sesuai hasil perhitungan ini, meliputi:

- a. Jika $EXTAND < 1$; lembaga atau suatu kegiatan harus mendapat sentuhan pengembangan;
 - b. Jika $EXTAND = 1$; lembaga atau kegiatan yang dikembangkan telah mencapai kondisi minimal yang dibutuhkan, namun masih membutuhkan upaya untuk mempertahankannya atau berupaya untuk meningkatkan kondisi yang lebih dari suatu syarat minimum melalui upaya-upaya pengembangan; atau
 - c. Jika nilai $EXTAND > 1$; lembaga atau suatu kegiatan harus tetap mempertahankan kondisi yang ada sambil didukung dengan upaya-upaya pengembangan.
2. ***Analisis Kesesuaian Jenis ProdukPilihanyang*** didasarkan pada beberapa komponenpenilaian/pengukurandengan mengacu pada data produksi jenis produk dan perkembangannya selama 5 (lima) tahun atau lebih dan

diekspresikan dalam bentuk table penilaian jenis produk pilihan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Analisis Kesesuaian Jenis Produk Pilihan

No	Komponen Penilaian	Jenis Produk		
		Telur	Benih	Induk
		Score (T/S/R)	Score (T/S/R)	Score (T/S/R)
1	Dukungan Sarpras			
2	Dukungan Kualitas Air			
3	Dukungan Induk Unggul			
4	Dukungan SDM/Skil			
5	Dukungan Komponen Penunjang Produksi (Pakan, Obat, BBM)			
6	Dukungan Kawasan/Perairan			
7	Peluang Pasar			
8	Kualitas Produk			
9	Kontinyuitas ketersediaan Produk			
Total Nilai				

Selanjutnya ketiga jenis produk tersebut dengan mengacu pada 9 komponen penilaian diatas akan diberi penilaian (score) dengan kisaran nilai *tinggi* (T) = 3, *sedang* (S) = 2 dan *rendah* (R) = 1 dan akan direkap total nilai/scorenya dimana total nilai tertinggi menunjukkan jenis produk yang seharusnya menjadi prioritas.

3. Analisis SWOT, untuk merumuskan strategi pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya berdasarkan pemetaan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal. Analisis SWOT merupakan analisis yang mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Stengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan (Rangkuti, 2006).

Tabel 3.2. Matriks SWOT

Internal Eksternal	KEKUATAN (<i>Strenght</i>)	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
PELUANG (<i>Opportunity</i>)	<i>Strategi Kekuatan-Peluang</i> Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<i>Strategi Kelemahan-Peluang</i> Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
ANCAMAN (<i>Threat</i>)	<i>Strategi Kekuatan-Ancaman</i> Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.	<i>Strategi Kelemahan-Ancaman</i> Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Sumber: Rangkuti (2006)

- Strategi yang dihasilkan lewat analisis SWOT selanjutnya diboboti lewat kuesioner oleh responden untuk mendapatkan urutan strategi prioritas. Strategi-strategi tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan prioritas pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2015 s/d 2019).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Masika Jaya berada di Dusun Masika Jaya, Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Berdasarkan letak geografis, BBIP Masika Jaya berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Laut Buano
Sebelah Timur	: Kecamatan Piru
Sebelah Barat	: Kecamatan Waesala
Sebelah Selatan	: Petuanan Ariate

BBIP Masika Jaya dibangun di atas tanah seluas 5 Ha yang daerahnya datar dengan struktur tanah berpasir dan berlumpur dan baru termanfaatkan sekitar \pm 1,5 Ha yang dipergunakan untuk perkantoran, rumah dinas, sarana pokok berupa ruangan perbenihan dan sarana prasarana penunjang lainnya. Sumber air laut untuk kepentingan perbenihan diperoleh langsung dari perairan sekitar balai dengan kondisi dasar pantai adalah pasir berlumpur serta memiliki kemiringan pantai yang tidak terlalu landai. Perbedaan pasang surut tidak terlalu tinggi, dimana pasang surut harian sekitar 5 meter dari garis pantai. Kebutuhan air bersih/tawar di UPTD BBIP Masika Jaya untuk operasional perbenihan, sampai saat ini masih mengalami kesulitan karena sumber air diperoleh dari sumur arteris ataupun sungai kecil di sekitar balai yang terkadang tidak dapat digunakan airnya karena mengandung kadar garam 1 ppm, bau dan berwarna coklat.

Adapun pasokan listrik pada UPTD BBIP Masika Jaya sangat bergantung pada kondisi pasokan listrik kawasan kecamatan Waisala yang sangat tidak stabil dan lebih sering padam daripada menyala sehingga dalam menunjang operasional balai, digunakan juga alat bantu berupa motor/mesin genzet yang menggunakan BBM.

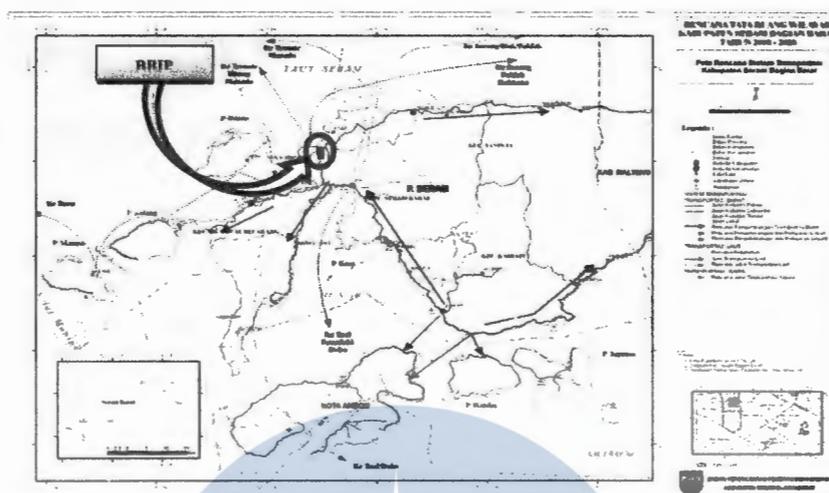


Gambar 4.1. Lokasi UPTD BBIP Masika Jaya dilihat dari Foto Udara
(Sumber : Google Earth)

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas ke UPTD BBIP Masika Jaya sebenarnya cukup mudah dijangkau dengan jarak dari kota Piru adalah \pm 45 Km. Namun karena buruknya kondisi jalan darat dari kota Piru menuju lokasi balai menyebabkan waktu tempuhnya menjadi lebih lama. Bila dihubungkan dengan lokasi bandara terdekat yaitu Bandara Internasional Pattimura di kota Ambon, maka waktu tempuhnya adalah berkisar 5 - 6 jam. Waktu tempuh ini sebenarnya bisa dipersingkat bila balai memiliki sarana transportasi laut yang memadai untuk pengangkut benih/telur. Hal inilah yang sebenarnya menjadi salah satu hambatan utama distribusi telur

dan benih di BBIP Masika Jaya (laporan Perkembangan Hasil Pelaksanaan Kegiatan UPTD BBIP Masika Jaya, 2011).



Gambar 4.2. Posisi BBIP Masika Jaya Secara Aksesibilitas

2. Organisasi UPTD BBIP Masika Jaya

UPTD BBIP Masika Jaya dibentuk secara resmi berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor:226 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perikanan Provinsi Maluku. Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Gubernur Maluku Nomor: 49 Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, maka tugas pokok dan fungsi utama dari Kepala UPTD BBIP Masika Jaya dalam menyusun rencana dan program pengembangan kegiatan Balai Benih Ikan Pantai Masika Jaya juga ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersebut. Kelembagaan UPTD BBIP Masika Jaya berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Tahun 2009, dengan struktur 1 (satu) pejabat eselon IIIa (Kepala) dan 2 (dua) pejabat eselon IVa (Kasubag TU dan

Kasie Benih Biota Laut) serta kelompok jabatan fungsional dengan Bagan Susunan Organisasi sebagai berikut :



Gambar 4.3. Struktur Organisasi UPTD BBIP Masika Jaya sesuai Pergub Nomor: 49 Tahun 2009

3. Kedudukan

Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Masika Jaya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dibidang pembenihan ikan pantai/laut, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. UPTD BBIP Masika Jaya memiliki Eselonisasi dan berkewenangan mengelola anggaran sendiri.

4. Fungsi

Balai Benih Ikan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu induk dan benih unggul serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

5. Tugas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) menyelenggarakan fungsi :

- a) Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional dinas bidang perbenihan.
- b) Menyusun rencana kerja operasional pengelolaan sarana Balai Benih Ikan Pantai serta melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaannya.
- c) Mengatur, mengelola dan menyempurnakan sarana perbenihan ikan air pantai.
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga guna pengembangan operasional perbenihan.
- e) Melaksanakan pengembangan komoditas perikanan untuk pengembangan budidaya ikan air pantai.
- f) Mengembangkan teknologi perbenihan dan pembudidayaan untuk disebar luaskan kepada masyarakat pembudidaya.
- g) Memberikan bimbingan teknis dibidang pengembangan benih dan pembudidayaan komoditas perikanan.
- h) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan benih yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun daerah.
- i) Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- j) Melakukan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.

6. Sarana dan Prasarana pada UPTD BBIP Masika Jaya

Dalam menjalankan operasionalnya, UPTD BBIP Masika Jaya didukung dengan fasilitas yang ada guna kelangsungan kegiatan harian balai. Adapun

Sarana dan Prasarana yang ada serta kondisinya secara terinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1. Kondisi Sarana dan Prasarana Terkini pada UPTD BBIP Masika Jaya

No	Jenis	Jumlah	Spesifikasi/ukuran	Keterangan
1.	Gedung indoor Hatchery	1 unit	17 x 8.50 m ²	Rusak
2.	Gedung outdoor Hatchery	1 unit	19 x 6 m ²	Rusak
3.	Mess operator type 48 m ²	1 unit	8 x 6 m ²	Rusak
4.	Rumah dinas type 70 m ²	1 unit	10 x 9 m ²	Rusak
5.	Rumah Genzet	1 unit	17 x 5.50 m ²	Baik
6.	Rumah blower	1 unit	5 x 3.50 m ²	Baik
7.	Gedung lab. Basah	2 unit	15 x 10 m ²	Baik
8.	Gedung lab. Pakan	1 unit	12.50 x 5 m ²	Baik
9.	Bangsai pendederan	1 unit	17 x 7 m ²	Rusak
10.	Menara air tawar	1 unit	2.50 x 1.50 m ²	Rusak
11.	Tower air laut	1 unit	3.50 x 3.50 m ²	Rusak
12.	Bak induk	2 unit	300 ton	Baik
13.	Bak fiber kultur pakan alami	6 unit	2 ton	Baik
14.	Bak beton kultur pakan alami	6 unit	12 ton	Rusak
15.	Bak penetasan telur/larva	14 unit		T.layak
16.	Bak pendederan	6 unit	1 x 1 x 1 m ³	Rusak
17.	Bak starter pakan hidup	1 unit		Rusak
18.	Instalasi pipa air tawar	2 unit		Baik
19.	Instalasi pipa air laut	1 unit		Blm layak
20.	Instalasi pipa aerasi	1 unit		Baik
21.	Instalasi listrik untuk genzet	1 unit		Baik
22.	Instalasi listrik untuk PLN	1 unit		Baik
23.	Speed boat	2 unit		Rusak
24.	Pagar keliling kantor	300 m		Rusak
25.	Keramba jaring apung	2 unit	3 x 3 x 3 m	Baik
26.	Menara tangki BBM	1 unit		Baik
27.	Alkon merek Honda	1 unit		Rusak
28.	Mesin pompa air laut	1 unit	EBARA	Baik
29.	Genset	4 unit	YOUR 15	Rusak 2 bh
30.	Hi blower	8 unit	HP 11 KW	Baik
31.	Mesin potong rumput	1 unit		Baik
32.	Freezer 2 pintu	1 unit		Rusak
33.	Gedung kantor	1 unit	28 x 12 m ²	Baik

Berdasarkan kondisi sarana dan prasarana yang ada, selanjutnya dikelompokan dalam beberapa variabel besar untuk selanjutnya dinilai perbandingan kondisi

eksisting dengan kondisi ideal. Pengelompokan sarana dan prasarana yang ada antara lain :

- a. Luas Lahan ; luas keseluruhan area UPTD BBIP Masika Jaya saat ini yaitu 5 Ha.
- b. SDM ; sebanyak 13 orang PNS, 2 orang petugas keamanan dan 5 orang honorer tenaga lepas.
- c. Sarana Air Bersih : hanya mengandalkan bak penampungan air hujan, sumur dan air sungai yang berada disekitar balai dengan jaringan air bersih yang kurang memadai untuk pemenuhan keperluan balai.
- d. Bak ; Jumlah bak yang dimiliki saat ini terdiri dari bak induk, bak fibre kultur pakan alami, bak beton pengolahan air laut, bak penetasan telur/larva, bak pendederan/penggelondongan dan bak pakan alami.
- e. Fasilitas pendukung yang ada saat ini yaitu ; kantor, jalan lingkungan , rumah pimpinan dan gudang.
- f. Fasilitas penunjang yang ada yaitu listrik.
- g. Fasilitas pengamanan yang ada yaitu pagar lingkungan dan pos jaga.
- h. Jumlah induk unggul jenis kerapu macan dan tikus sebanyak 26 ekor.

Fasilitas yang telah disebutkan diatas saat ini rata-rata berada dalam kondisi baik, hanya beberapa bak yang terdapat di UPTD BBIP Masika Jaya yang berada dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat seperti yang digambarkan dalam tabel 4.1. Namun jika mengacu pada kondisi ideal sebuah UPTD Balai Benih milik pemerintah yang secara teknis (persyaratan dan kelayakan) telah digambarkan pada Bab II laporan penelitian ini, maka fasilitas yang ada pada

UPTD BBIP Masika Jaya saat ini masih jauh dari kondisi standar. Hal ini dapat dilihat secara jelas pada Grafik EXTAND yang akan dibahas selanjutnya.

7. Sumberdaya Manusia (SDM) pada UPTD BBIP Masika Jaya

Pegawai yang bekerja pada UPTD Balai Benih Ikan Pantai Masika Jaya sampai dengan bulan Desember 2013 berjumlah 20 orang yang terdiri dari tenaga Pasca Sarjana Teknis : 2 orang, tenaga Sarjana Teknis Perikanan : 6 orang, tenaga teknis SLTA/SPP-SUPM 6 orang dan tenaga administrasi SLTA 2 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah berstatus PNS sebanyak 13 orang sedangkan sisanya 7 orang masih berstatus Honorer Tenaga Lepas. SDM perikanan yang telah mengikuti magang teknis budidaya ikan pantai adalah sebanyak 8 orang. Untuk pengembangan BBI yang baik, sampai saat ini BBIP Masika Jaya telah mempunyai dua orang SDM yang telah memiliki sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Dengan segala keterbatasan SDM yang ada, UPTD BBIP Masika Jaya tetap berupaya menjalankan tugas pokoknya sebagai penyedia benih berkualitas kepada masyarakat. Selain itu juga diemban tugas lain yaitu yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia khususnya masyarakat pembudidaya ikan pantai khususnya yang berdomisili disekitar kawasan balai. Tercatat pada tahun 2013 telah dilaksanakan pelatihan peningkatan keterampilan pembudidaya dan pembudidaya pemula dengan menghadirkan 75 orang peserta. Selain itu UPTD BBIP Masika Jaya pun untuk tahun yang sama telah menerima kehadiran 40 orang siswa SMK Perikanan Wael yang melaksanakan magang teknis dan praktek selama 30 hari dan telah menerima pula satu orang mahasiswa fakultas Perikanan Universitas Darussalam yang melaksanakan PKL. Jumlah pegawai UPTD BBIP

Masika Jaya sebagaimana digambarkan diatas, selanjutnya dirinci berdasarkan Tingkat Pendidikannya pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2. Keadaan Pegawai pada BBIP Masika Jaya berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Keragaan Pegawai	Tingkat Pendidikan					Jurusan
		SD	SMP	SLTA	S1	S2	
1.	Tenaga Teknis Perikanan	-	-	-	-	2	- S2 Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan, 1 orang - S2 Jurusan Budidaya, 1 Orang
		-	-	5	6	-	- S1 Jurusan MSP, 4 orang - S1 Jurusan BDP, 2 orang - SLTA Jurusan IPA, 1 orang. - SUPM Jurusan BDP, 3 orang - SUPM Jurusan Mesin, 1 orang
2.	Tenaga Non Teknis Perikanan	-	1	5	1	-	- S1 Jurusan MSP, 1 orang - SMEA Jurusan Administrasi, 1 orang - SLTA Jurusan IPS, 1 orang.
Jumlah		0	1	10	7	2	
		20					

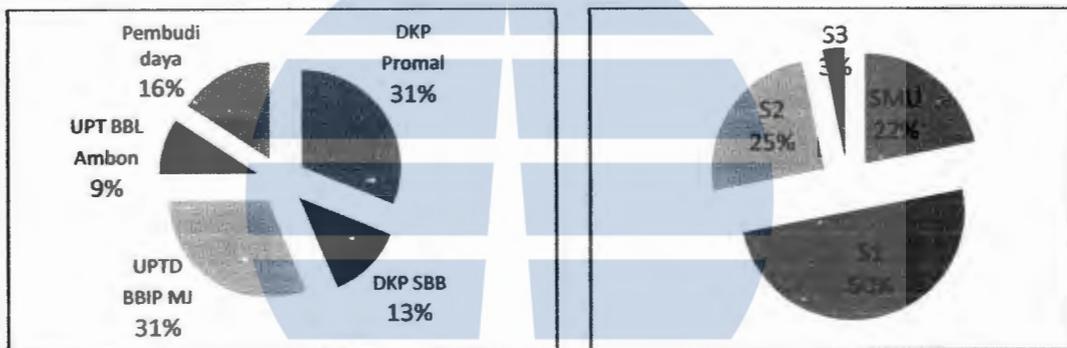
B. Hasil

1. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini populasi dan sampel berjumlah 32 responden dengan perincian 10 responden berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, 4 responden berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat, 3 responden berasal dari UPT Loka Budidaya Laut Waiheru, 10 responden berasal dari UPTD BBIP Masika Jaya dan 5 responden adalah merupakan masyarakat pembudidaya. Adapun karakteristik responden secara terinci adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3. Karakteristik Responden

No	Klasifikasi Responden	Jumlah/Waktu	Keterangan
1.	Tingkat Pendidikan : a. SMU sederajat b. S1 sederajat c. S2 d. S3	a. 7 Orang b. 16 Orang c. 8 Orang d. 1 Orang	seluruh responden memahami budidaya/ perbenihan ikan dan atau perencanaan pembangunan perikanan budidaya
2.	Usia a. 31 – 40 tahun b. 41 – 50 tahun c. > 50 tahun	a. 14 Orang b. 15 Orang c. 3 Orang	
3.	Pengalaman Kerja (PNS)	> 5 tahun	
4.	Pengalaman Usaha (Pembudidaya)	> 3 Tahun	



Grafik 4.1. Perbandingan Asal dan Tingkat Pendidikan Responden

Dari grafik 4.1. diatas tergambar bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh responden yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku termasuk didalamnya UPTD BBIP Masika Jaya yaitu sebanyak 62% dengan tingkat pendidikan responden didominasi oleh Sarjana (S1) perikanan dengan presentase sebesar 51%, kemudian S2 sebanyak 25%, SMU sederajat sebanyak 22% dan S3 sebanyak 3%.

2. Evaluasi Kondisi Eksisting Beberapa Variabel Pengukuran Pada UPTD BBIP Masika Jaya

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan nilai EXTAND diperbandingkan kondisi eksisting dan standar dari 10 variabel pengukuran berdasarkan syarat teknis dengan hasil analisis EXTAND sebagai berikut.

Tabel 4.4. Hasil analisis EXTAND

No.	Syarat Teknis	Standar	Eksisting	EXTAND	Batas Aman	Ket
1	Luas Lahan (Ha) Yang Memadai dengan Kemiringan ideal 1 s/d 5 %	5	5	1,00	1,00	sama
2	Kebutuhan air bersih yang memadai (liter/hari) yang tersedia sepanjang tahun, bebas bakteri, bebas logam berat dan bebas banjir.	4000	200	0,05	1,00	Kurang
3	Kondisi Bak Pemijahan dengan Volume minimal sesuai SNI (ton).	12	4	0,33	1,00	Kurang
4	Kondisi Bak Tendon Pengolah Air Laut dengan Volume minimal sesuai SNI (ton).	24	12	0,50	1,00	Kurang
5	Jumlah & Jenis Induk Unggul	100	26	0,26	1,00	Kurang
6	Keberadaan Fasilitas Pendukung : (Kantor, Jalan Kompleks, Saluran air hujan & limbah, Rumah Pimpinan, Rumah Karyawan, Bengkel (workshop), Laboratorium Kesehatan Ikan, sarana cuci tangan, footbatch , carbath, pengukur kualitas air, gudang peralatan, bangunan unit pembuatan pakan, system penyediaan air bersih, peralatan kantor, peralatan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, alat distribusi bahan baku dan mesin produksi pakan).	19	4	0,21	1,00	Kurang
7	Fasilitas Penunjang : showroom benih/benur, tempat packing distribusi benih, tempat pelatihan, rumah tamu (guest house), gedung pertemuan, fasilitas olahraga, jaringan listrik lingkungan, pertamanan (land scapping), ruang ibadah, perpustakaan dan jalan lingkungan.	11	3	0,27	1,00	Kurang

8	Keberadaan Fasilitas Pelengkap : gudang pakan, rumah pompa, rumah genset, rumah blower dan meubelair.	5	3	0,60	1,00	Kurang
9	Keberadaan Fasilitas Pengamanan : dinding penahan gelombang, tanggul, pos jaga, pagar lingkungan, perlengkapan pengaman, penangkal petir dan tabung pemadam kebakaran.	6	3	0,5	1,00	Kurang
10	SDM yang berkualitas	50	20	0,4	1,00	Kurang
Rata-rata				0,41	1,00	Butuh Penanganan

Berdasarkan hasil evaluasi, tergambar bahwa dari 10 (sepuluh) variabel yang menjadi tolak ukur kondisi eksisting UPTD BBIP Masika Jaya saat ini, variabel luas lahan memiliki nilai EXTAND 1,00, Variabel ketersediaan/kebutuhan pemakaian air bersih/hari dan volume dan kondisi bak pemijahan memiliki nilai EXTAND 0,05 dan 0,33. Variabel volume dan kondisi bak tendon serta jumlah dan jenis induk ikan yang ada di UPTD BBIP Masika Jaya saat ini memiliki nilai EXTAND 0,50 dan 0,10. Variable SDM yang berkualitas memiliki nilai EXTAND 0,40 sedangkan variabel fasilitas pendukung, fasilitas penunjang, fasilitas pelengkap dan fasilitas pengamanan memiliki nilai EXTAND masing-masing adalah 0,32, 0,27, 0,60 dan 0,5.

3. Perbandingan Kesesuaian Jenis Produk Pilihan

Penilaian jenis produk pilihan dalam penelitian ini didasarkan pada 9 variabel penilaian yaitu dukungan sarana dan prasarana, dukungan kualitas air, dukungan induk unggul, dukungan SDM/skill, dukungan komponen penunjang produksi (pakan, obat-obatan dan BBM), dukungan kawasan/perairan, peluang pasar, kualitas produk dan kemampuan penyediaan produk. Selanjutnya 3 jenis

produk pilihan yaitu telur, benih dan induk dianalisa untuk menghasilkan keluaran berupa apa sesungguhnya produk yang berpeluang untuk dikembangkan sebagai komoditi pilihan pada BBIP masika Jaya. Adapun gambaran hasil analisis kesesuaian jenis produk pilihan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5. Analisis Kesesuaian Jenis Produk Pilihan di UPTD BBIP Masika Jaya

No	Komponen Penilaian	Jenis Produk		
		Telur	Benih	Induk
		Score (T/S/R)	Score (T/S/R)	Score (T/S/R)
1	Dukungan Sarpras	2	1	2
2	Dukungan Kualitas Air	2	1	2
3	Dukungan Induk Unggul	2	2	2
4	Dukungan SDM/Skill	3	2	3
5	Dukungan Komponen Penunjang Produksi (Pakan, Obat, BBM)	2	1	2
6	Dukungan Kawasan/Perairan	3	2	2
7	Peluang Pasar (lokal & nasional)	3	3	2
8	Kualitas Produk	3	1	2
9	Kontinuitas ketersediaan Produk	3	1	1
Total Nilai		23	14	18

Hasil analisis diatas menggambarkan bahwa dengan kondisi dukungan 9 komponen yang sama menunjukkan bahwa jenis produk *telur* memperoleh nilai terbesar yaitu 23 kemudian diikuti oleh jenis produk *induk* sebesar 18 dan *benih* sebesar 14.

4. Lingkungan Strategis Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya

Konsep pengembangan BBIP Masika Jaya secara umum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada, baik faktor eksternal maupun internal yang dapat

menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan sebuah UPTD BBIP Masika Jaya. Lingkungan internal secara sinergis menentukan kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) untuk pemerintah khususnya DKP Provinsi Maluku dalam menyikapi permasalahan yang ada guna mendukung pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya. Lingkungan internal yang berpengaruh terhadap Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya akan diuraikan dibawah ini.

(I) Kekuatan (*Strengths*)

1. Ketersediaan lahan yang memadai untuk pengembangan infrastruktur;
2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mendukung pengembangan budidaya perikanan;
3. Ketersediaan induk unggul di alam yang memadai;
4. Lokasi UPTD BBIP Masika Jaya yang strategis.

(II) Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kurangnya Perhatian DKP Provinsi Maluku;
2. Kontribusi pendanaan APBD maupun APBN yang minim;
3. Minimnya sarana prasarana yang tersedia;
4. SDM yang belum profesional;
5. Ketidacermatan penetapan produk/komoditi pilihan;
6. Jalur transportasi, komunikasi dan ketersediaan listrik dan BBM disekitar balai yang tidak mendukung.

Lingkungan eksternal pada UPTD BBIP Masika Jaya yang secara strategis mempengaruhi Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya, baik peluang (*Opportunities*) maupun ancaman (*Threats*).

(III) Peluang(*Opportunities*)

1. Daerah pemasaran yang luas, mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku bahkan sampai ke mancanegara;
2. Jaringan kerja mencakup lembaga terkait baik Pemerintah maupun sektor swasta;
3. Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional;
4. Penetapan Kawasan Balai sebagai pusat minapolitan budidaya di Maluku.

(IV) Ancaman(*Threats*)

1. Pencemaran Air akibat penambangan maupun aktivitas lainnya
2. Hama dan Penyakit Ikan
3. Keinginan pihak Dirjen Budidaya untuk menutup balai bila tidak dapat beroperasi secara optimal.

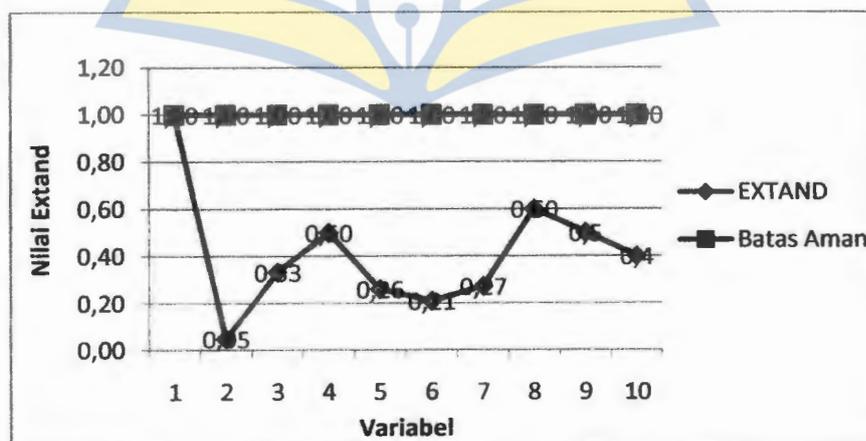
C. Pembahasan**1. Evaluasi Kondisi Existing dan Peluang Pengembangan UPTDBBIP Masika Jaya**

Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya kedepan pada prinsipnya bergantung pada bagaimana menata manajemen yang baik dan disesuaikan dengan kondisi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang penting untuk mengetahui kondisi eksisting UPTD BBIP Masika Jaya saat ini, baik potensi yang ada maupun permasalahan yang ditemui sehingga akan sangat bermanfaat dalam merumuskan strategi yang akan diterapkan dalam pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya dimasa yang akan datang.

a. Analisis Kondisi Eksisting dan Standar UPTD BBIP Masika Jaya

Kelancaran operasional sebuah UPTD sangat tergantung pada sarana dan prasarana yang dimiliki. UPTD BBIP Masika Jaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan Petunjuk Teknis UPTD Dirjen Perikanan Budidaya (2010), pada umumnya prasarana dan sarana UPTD (Balai Benih Ikan) terdiri dari Unit produksi benih, produksi induk, unit pemasaran, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, unit pengolahan kesehatan ikan dan lingkungan, unit diseminasi teknologi terapan dan keperluan lainnya, yang dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok yaitu : sarana dan prasarana pokok, bangunan sarana dan prasarana pendukung, bangunan sarana dan prasarana penunjang, bangunan sarana dan prasarana pengaman serta bangunan sarana dan prasarana pelengkap.

Analisis kondisi existing terhadap pembangunan UPTD BBIP Masika Jaya saat ini dievaluasi dengan menggunakan metode EXTAND (Abrahamsz, 2010). Kondisi UPTD BBIP Masika Jaya saat ini tergambar dengan jelas dalam Grafik EXTAND dibawah ini.



Grafik 4.2. Kondisi EXTAND UPTD BBIP Masika Jaya saat ini

Gambaran kondisi tersebut menurut Abrahamsz (2010) menunjukkan bahwa hanya satu variabel saja yaitu luas lahan yang memenuhi syarat nilai aman yang berarti telah memenuhi syarat minimum namun tetap membutuhkan strategi untuk mempertahankannya atau berupaya untuk meningkatkan kondisi tersebut ke arah yang lebih baik. Sedangkan 9 variabel lainnya berada pada kisaran angka < 1 yang berarti bahwa eksistensi parameter belum mencapai standar minimum sesuai persyaratan yang ditetapkan, sehingga sangat membutuhkan kebijakan pengembangan.

Variabel luas lahan ideal dengan kemiringan 1 - 5 % seluas 5 Ha bagi sebuah Balai Perbenihan Ikan yang dikelola oleh Provinsi sesuai Juknis Ditjen Perikanan Budidaya, 2010 ternyata dapat dipenuhi oleh UPTD BBIP Masika Jaya. Tercatat bahwa UPTD BBIP Masika Jaya saat ini memiliki luas lahan sesuai persyaratan diatas sebesar 5 Ha namun baru termanfaatkan sebesar 1,5 Ha yang berisi bangunan kantor induk, 2 unit rumah dinas, sarana pokok berupa ruangan perbenihan dan sarana prasarana penunjang lainnya.

Air sebagai media hidup ikan merupakan sarana yang vital dalam proses produksi benih. Oleh karena itu air yang akan digunakan untuk media pemeliharaan induk, penetasan telur, pemeliharaan benih dan kultur pakan alami harus memenuhi standar baku mutu air, yaitu bersih, bebas hama dan parasit serta organisme patogen (Pedoman Umum CPIB, 2008). Variabel Kebutuhan air bersih yang memadai untuk kebutuhan UPTD BBIP Masika Jaya dengan kondisi ideal sebesar 4000 liter/hari yang tersedia sepanjang tahun, bebas bakteri, bebas logam berat dan bebas banjir ternyata belum dapat terpenuhi. Saat ini akibat tidak adanya sumber air bersih disekitar kawasan balai, UPTD BBIP

Masika Jaya hanya mampu memenuhi kebutuhan air bersih sebanyak 200 liter/hari dan itupun hanya terjadi bila kondisi tidak hujan karena sumber air bersih langsung berasal dari sungai. Kedepannya sangat diharapkan adanya perhatian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku maupun lewat koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk dapat mencari sumber air bersih yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang memadai setiap saat sesuai kebutuhan.

Variabel kondisi bak pemijahan dengan volume minimal sesuai SNI sebesar 12 ton agar dapat menunjang kestabilan suhu media (air laut) bagi kepentingan perkembangan fase telur menuju fase larva/benih ternyata belum dapat terpenuhi. UPTD BBIP Masika Jaya saat ini memiliki fasilitas bak pemijahan sebanyak 14 buah namun dengan volume masing-masing bak sebesar 4 ton dengan ruangan/gedung perbenihan yang struktur bangunannya tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebuah gedung perbenihan. Kondisi ini menyebabkan sangat sulit untuk mempertahankan suhu ideal bagi pertumbuhan telur menuju fase larva/benih yaitu antara 28°C - 31°C apalagi bila malam hari atau saat musim hujan. Begitupun dengan variabel kondisi bak tendon pengolahan air laut (filtrasi) dengan volume minimal sesuai SNI sebesar 24 ton agar dapat menunjang pelaksanaan proses perbenihan ternyata belum terpenuhi pula karena UPTD BBIP Masika Jaya saat ini hanya memiliki bak tendon dengan ukuran 12 ton dengan kondisi mulai rusak.

Variabel jumlah dan jenis induk unggul bagi kepentingan perbenihan pada UPTD BBIP Masika Jaya juga berada pada kondisi yang sangat tidak ideal dimana dari persyaratan 100 ekor induk unggul agar proses perkawinan dapat

lebih maksimal pada 4 siklus produksi dalam setahun dengan ketentuan 1 ekor induk hanya melaksanakan 2 kali proses kawin dalam setahun, UPTD BBIP Masika Jaya saat ini hanya memiliki 26 ekor induk dengan kualitas cukup baik.

Untuk variabel kondisi fasilitas pendukung, penunjang, pelengkap dan pengamanan yang pada penelitian ini hanya diperbandingkan secara kuantitas ada atau tidak ada (keberadaannya) pada UPTD BBIP Masika Jaya dan bukan membandingkan secara kualitas dan kelengkapan bangunan/fasilitas, ternyata dari total 41 buah fasilitas yang dipersyaratkan harus ada dan dibangun pada sebuah balai perbenihan, UPTD BBIP Masika Jaya saat ini hanya memiliki 13 buah fasilitas tersebut. Kondisi inipun pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap optimalisasi dan kinerja balai sendiri dalam melaksanakan fungsinya.

Variabel SDM yang berkualitas juga mengalami kondisi nilai dibawah batas aman dimana sesuai persyaratan untuk ukuran UPTD BBIP Masika Jaya yang merupakan unit perbenihan skala provinsi harus memiliki 50 orang pegawai termasuk tenaga teknis fungsional tertentu diantaranya pelaksana produksi, pengawas, perekayasa dan pelitkayasa, saat ini UPTD BBIP Masika Jaya hanya memiliki 20 orang pegawai dengan tingkat kompetensi yang rendah. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya standar operasional prosedur dan belum diterapkannya prosedur kerja teknis perbenihan termasuk organisasi kerja dan alur kerjanya akibat keterbatasan jumlah staf teknis dan sarpras yang ada.

Sedangkan dari seluruh hasil penilaian 10 variabel tersebut, perhitungan terhadap nilai EXTAND secara holistik berdasarkan distribusi nilai rata-rata EXTAND parsial menghasilkan nilai EXTANDUPTD BBIP Masika Jaya sebesar 0,41. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi sarana dan prasarana

serta sumberdaya aparatur di UPTD BBIP Masika Jaya berada pada level yang sangat tidak maksimal untuk melaksanakan fungsinya terutama dalam hal penyediaan produk benih dan induk unggul secara kontinyu, melaksanakan distribusi penyaluran produk serta fungsi perekayasaan dan transfer IPTEK bagi masyarakat pembudidaya sehingga kedepannya sangat membutuhkan strategi pengembangan yang tepat dan terarah.

Agar UPTD BBIP Masika Jaya dapat berfungsi optimal, maka perlu didukung dengan dana operasional yang memadai, SDM yang kompeten, sarana dan prasarana fisik yang sesuai standar rancang bangun serta adanya standar prosedur operasional yang sesuai dengan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana yang ada di UPTD BBIP Masika Jaya saat ini harus diperhatikan pengembangannya dengan cermat karena terkait langsung dengan proses produksi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan apa yang digambarkan oleh Dwiyanto (2013) bahwa, kelayakan fasilitas suatu unit pembenihan menjadi faktor yang cukup penting dalam memproduksi benih, karena kelayakan fasilitas akan mempengaruhi operasional unit pembenihan secara optimal. Kelayakan fasilitas dimaksud adalah kesesuaian ketersediaan fasilitas/sarana pembenihan yang mencakup jumlah, kondisi dan kemampuan (daya dukung).

Ditegaskan pula dalam pedoman umum CPIB (2008) bahwa, pengembangan suatu usaha perikanan budidaya sangat tergantung pada ketersediaan induk dan benih unggul serta manajemen pengelolaannya. Induk dan benih merupakan salah satu sarana produksi yang mutlak dan akan menentukan keberhasilan usaha budidaya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya jumlah induk yang sesuai serta

memenuhi persyaratan perbenihan. Moretti dkk. (1999) dalam panduan praktik pemeliharaan kerapu macan (*aviar*, 2013) mencatat sifat-sifat yang dapat dijadikan indikator untuk memilih induk ikan yang baik pada *seabass* Eropa (*Dicentrarchus labrax*) dan ikan *gilthead seabream* (*Sparus aurata*). Indikator tersebut dapat diterapkan pada ikan kerapu, diantaranya:

- Bentuk tubuh dan warna yang normal;
- Tidak adanya kelainan bentuk tulang;
- Status yang sehat secara keseluruhan, yaitu tidak adanya luka yang besar, pendarahan, infeksi dan parasit;
- Perilaku yang normal, seperti reaksi yang baik terhadap pemberian makanan, daya apung yang terkendali agar dapat mempertahankan posisi di kolom air;
- Pertumbuhan dan tingkat konversi pakan yang terbaik dalam kelompok umurnya.

Selain itu tugas dan fungsi unit perbenihan adalah juga menjamin ketersediaan benih ikan yang berkualitas serta penyalurannya, disamping fungsi lainnya sebagai tempat pelaksanaan perekayasa teknologi perbenihan di wilayah kerjanya. Benih yang dihasilkan oleh suatu unit perbenihan harus betul-betul memenuhi persyaratan benih yang berkualitas, tersedia sepanjang waktu dan diharapkan yang memenuhi kriteria 7 tepat yaitu *tepat jenis, jumlah, ukuran, waktu, tempat, mutu dan harga* guna mendukung keberhasilan proses produksi perikanan budidaya. Adapun persyaratan benih ikan kerapu yang berkualitas menurut juknis DJPB, 2010 adalah :

- Ukurannya seragam, bebas penyakit;

- Gerakan berenang tenang serta tidak membuat gerakan yang tidak beraturan atau gelisah tetapi akan bergerak aktif bila ditangkap;
- Respon terhadap pakan baik;
- Warna sisik cerah, mata terang, sisik dan sirip lengkap serta tidak cacat tubuh.

Kebijakan dan program pengembangan UPTD perbenihan idelanya harus dilaksanakandengan mengacu pada sistem perbenihan perikanan. Sistem perbenihan perikananadalah suatu tatanan strategis dalam pengembangan perbenihan perikanan untukmendukung pembangunan perikanan dengan memanfaatkan IPTEK, modal, sumberdaya ikan dan sumberdaya lainnya. Sistem sumberdaya perikanan terdiri dari tiga subsistem yaitu subsistem penelitian, subsistem pengadaan, dan subsistem pengawasan (Petunjuk Teknis UPTD,2010).

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa walaupun secara umum kondisi kelayakan fasilitas dan tenaga kerja di UPTD BBIP Masika Jaya berada pada kondisi yang tidak maksimal untuk menunjang operasional kegiatan perbenihan sesuai standarisasi Direktorat Perbenihan, namun oleh Dwiyanto (2013) berdasarkan hasil evaluasinya menjelaskan bahwa secara keseluruhan kondisi fasilitas pokok dan pendukung kegiatan operasional di unit perbenihan UPTD BBIP Masika Jaya masih layak dan mampu mendukung pelaksanaan kegiatan operasional perbenihan, meskipun ada beberapa fasilitas yang membutuhkan rehabilitasi dan renovasi serta tentunya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang ada saat ini.

b. Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak

1) Faktor-Faktor Penyebab

Berdasarkan data terukur yang diperoleh dari analisis variabel-variabel terukur dengan menggunakan metode EXTAND maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab tidak optimalnya kinerja UPTD BBIP Masika Jaya adalah :

- a) Ketersediaan air bersih yang memadai dengan kondisi ideal sebesar 4000 liter/hari yang tersedia sepanjang tahun, bebas bakteri, bebas logam berat dan bebas banjir ternyata belum dapat terpenuhi.
- b) Kondisi bak pemijahan dengan volume minimal sesuai SNI sebesar 12 ton agar dapat menunjang kestabilan suhu media (air laut) bagi kepentingan perkembangan fase telur menuju fase larva/benih ternyata belum dapat terpenuhi.
- c) Kondisi bak tendon pengolahan air laut (filtrasi) dengan volume minimal sesuai SNI sebesar 24 ton yang berfungsi untuk mengendapkan, menyaring dan menyimpan air sehingga diperoleh air yang bermutu dalam jumlah yang cukup belum dapat terpenuhi.
- d) Jumlah dan jenis induk unggul bagi kepentingan perbenihan sebanyak 100 ekor belum dapat terpenuhi.
- e) Kondisi kuantitas fasilitas pendukung, penunjang, pelengkap dan pengamanan sebanyak 41 buah bangunan belum dapat terpenuhi.
- f) Jumlah SDM aparatur yang berkualitas sebanyak 50 orang dengan kompetensi kerja yang memadai dan ditunjang oleh penerapan prosedur

kerja teknis perbenihan termasuk organisasi kerja dan alur kerjanya belum dapat terpenuhi.

2) Dampak

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat permasalahan diatas antara lain :

- a) UPTD BBIP Masika Jaya belum dapat melaksanakan fungsinya dalam hal penyediaan produk benih dan induk unggul serta pendistribusiannya secara kontinyu.
- b) UPTD BBIP Masika Jaya belum dapat melaksanakan rekayasa teknologi dan transfer IPTEK kepada pembudidaya ikan secara maksimal.
- c) Keberadaan balai dalam hal menunjang peningkatan ekonomi kawasan dan masyarakat khususnya pembudidaya ikan belum dapat terlaksana.

c. Isu–isu Pokok Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya

Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Masika Jaya dalam fungsinya sebagai penghasil induk dan benih unggul dalam operasionalnya tidak terlepas dari berbagai isu-isu pokok yang mempengaruhi pengembangan BBIP Masika Jaya sendiri. Isu-isu pokok dalam pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya yang ada saat ini, antara lain sebagai berikut :

- 1) Saat ini Struktur Organisasi UPTD BBIP Masika Jaya mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2009 Tanggal 4 Desember 2009 tentang Struktur Organisasi SKPD Provinsi Maluku dan PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah UPTD Pembenihan Ikan. Struktur organisasi UPTD BBIP Masika Jaya terdiri dari Kepala Balai, Ketatausahaan, Fungsi Pelaksana

Produksi, Fungsi Pelaksana Distribusi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Namun karena sampai saat ini belum menerapkan Prosedur Kerja Teknis perbenihan akibat keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM menyebabkan kelompok jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari devisi perbenihan, budidaya dan Hama Penyakit Ikan (HPI) belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal.

2) Pemanfaatan Lahan yang belum maksimal. Lahan yang tersedia saat ini sebesar 5 Ha, namun baru dimanfaatkan sebesar 1,5 Ha sehingga peluang pengembangan lahan masih sebesar 3,5 Ha. Lahan yang ada hanya terisi dengan gedung perkantoran sebagai pusat pelayanan serta beberapa bangunan penunjang proses perbenihan dengan kondisi yang kurang memadai sehingga berpengaruh terhadap aktifitas balai. Padahal bila mengacu pada Petunjuk Teknis UPTD (DJPB, 2006), sebuah UPTD seharusnya memiliki sarana dan prasarana pokok, pendukung, penunjang, pengaman dan pelengkap. Ketersediaan sarana-prasarana yang ada tentunya akan sangat mendukung optimalnya kinerja sebuah Balai Benih Ikan.

3) Alokasi dana yang minim antara DKP Provinsi Maluku dengan UPTD BBIPMasika Jaya. Saat ini kontribusi dana baik Pusat maupun Daerah masih terlihat sangat minim. Untuk Tahun 2013 kontribusi dana APBN adalah sebesar Rp.100.000.000,00 dan APBD Provinsi sebesar Rp.300.000.000,00. Kontribusi dana yang minim ini sangat berpengaruh terhadap operasional BBIP Masika Jaya, baik dari segi pemeliharaan dan pembangunan fasilitas maupun produksi. Pada dasarnya pelaksanaan suatu kegiatan perbenihan sangat ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang tentunya menuntut pembiayaan yang

memadai dari pemerintah. Walaupun untuk tahun 2013 sesuai Petunjuk Teknis DJPB, kondisi pengelolaan anggaran telah mengalami perubahan dimana kegiatan dengan sumber dana APBD telah dikelola langsung oleh balai sedangkan kegiatan dengan sumber dana APBN masih dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, namun dengan minimnya anggaran yang dikucurkan menyebabkan kinerja balai tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Belum lagi diperparah dengan kenyataan seringnya perencanaan pengembangan balai yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk alokasi dana APBN sering tidak sesuai dengan kebutuhan perencanaan balai.

4) Kondisi sarana dan prasarana perbenihan pada balai yang kurang memadai. Telah banyak dijelaskan diatas bahwa keberhasilan suatu proses perbenihan akan sangat ditentukan oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang ada. Saat ini kondisi bak perbenihan/larva serta ruangnya, bak plankton dan bak kultur masal (rotifer dan plankton) banyak yang rusak serta tidak memenuhi standar operasional produksi perbenihan. Minimnya fasilitas pada UPTD BBIP Masika Jaya juga terlihat dari belum adanya beberapa fasilitas pendukung, penunjang, pelengkap dan pengamanan termasuk diantaranya fasilitas gedung laboratorium hama dan penyakit ikan yang lengkap dengan peralatannya. Kegiatan pembenihan merupakan kegiatan pokok dan boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan lainnya pada balai. Kegiatan pendederan dan pembesaran/budidaya tentu akan memerlukan benih yang berasal dari kegiatan pembenihan. Dalam menghasilkan benih yang unggul dan berkualitas secara kontinyu tentunya tidak terlepas dari keberadaan faktor fisik yang mendukung seperti kualitas dan kuantitas sarpras, kualitas air, listrik serta pakan.

- 5) Sumberdaya manusia (SDM) aparatur yang saat ini bekerja di UPTD BBIP Masika Jaya masih kurang terampil, kurang profesional akibat penempatan staf yang tidak kompeten serta masih terbatas jumlahnya. Padahal untuk memaksimalkan pelaksanaan proses produksi perbenihan secara menyeluruh pada balai, sudah tentu memerlukan dukungan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang memadai dan terampil. Terkait dengan kondisi tersebut kedepannya sangat diperlukan adanya penambahan jumlah SDM terutama tenaga fungsional teknis dengan dasar pendidikan yang memadai serta memperbanyak keikutsertaan mereka dalam magang/pelatihan teknis bagi peningkatan kemampuan budidaya/perbenihan ikan pantai sehingga permasalahan tersebut dapat teratasi.
- 6) Ketidacermatan penetapan jenis produk pilihan/unggulan. Dalam enam tahun terakhir tercatat bahwa UPTD BBIP Masika Jaya walau dengan berbagai keterbatasan yang ada, berhasil memproduksi telur secara kontinyu dengan kualitas terbaik (laporan hasil riset BBAP Situbondo, 2010). Namun karena tidak ditopang dengan fasilitas (ruangan dan bak) perbenihan yang baik maka agak sulit untuk melanjutkan proses tersebut keningkat produksi benih sehingga selama ini telur-telur tersebut dilepaskan ke laut. Padahal jika mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan telur berkualitas di kawasan barat Indonesia serta kemampuan UPTD BBIP Masika Jaya dalam memproduksi telur secara kontinyu, maka sebaiknya pihak DKP Provinsi Maluku perlu mempertimbangkan jenis produk pilihan yang dihasilkan oleh balai saat ini yaitu bukan hanya benih dan induk unggul tetapi juga telur.
- 7) Manajemen pemasaran yang belum tertata dengan baik, sehingga mengakibatkan proses pemasaran telur maupun benih dan induk (pada saatnya

nanti) tidak berjalan secara optimal. Pada dasarnya agar kegiatan pemasaran berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang maksimal, maka diperlukan kegiatan pengelolaan dalam pemasaran jenis komoditi yang dihasilkan pada UPTD BBIP Masika Jaya termasuk tentunya melalui penyiapan sarana transportasi demi ketepatan waktu distribusi (Pedoman Umum CPIB, 2008).

8) Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Kondisi ini sudah pasti mendorong terciptanya industrialisasi pada sektor perikanan di Maluku termasuk perikanan budidaya. Terkait hal tersebut maka tentunya akan merangsang UPTD BBIP Masika Jaya sendiri sebagai salah satu penghasil benih dan induk yang berkualitas untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam hal penyediaan benih dan induk unggul. Belum lagi fungsi UPTD sebagai penyedia teknologi perbenihan dituntut untuk mampu memaksimalkan fungsinya dalam hal penyiapan masyarakat pembudidaya serta produknya agar mampu berdaya saing dan beradaptasi dengan tuntutan industrialisasi.

9) Letak UPTD BBIP Masika Jaya yang Strategis. UPTD BBIP Masika Jaya secara tata letak berada pada kawasan sentra produksi budidaya rumput laut di teluk kotania Kabupaten Seram Bagian Barat yang juga oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kawasan tersebut telah pula direncanakan sebagai kawasan minapolitan budidaya perikanan. Selain itu letak UPTD BBIP Masika Jaya yang kebetulan berada pada pantai utara P. Seram ini secara aksesibilitas cukup tinggi dan dapat menjangkau keseluruhan wilayah pengembangan budidaya perikanan di Provinsi Maluku

2. Analisis Kesesuaian Pengembangan Jenis Produk Pilihan pada UPTD BBIP Masika Jaya

Pada dasarnya, keberadaan produk unggulan pada suatu daerah akan memudahkan upaya pengembangan bisnis. Keberadaan produk unggulan akan lebih mudah dan lebih rasional untuk dikembangkan jika dipandang dari kemampuan produksi dan kebutuhan pasar. UPTD BBIP Masika Jaya sebagai instansi milik Pemerintah Provinsi Maluku dalam menghasilkan telur, benih dan induk yang berkualitas, perlu memperhatikan kemampuan produksi dan peluang pasar yang ada agar produk yang dihasilkan dapat didistribusikan sesuai permintaan pasar secara berkelanjutan.

Penilaian kesesuaian jenis produk pilihan dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan keluaran berupa apa sesungguhnya jenis produk yang berpeluang untuk dikembangkan sebagai produk pilihan pada UPTD BBIP Masika Jaya.

a. Produksi Telur, Benih dan Induk Ikan Kerapu pada UPTD BBIP Masika Jaya Tahun 2008-2013

Tabel 4.6. Jumlah Produksi Telur, Benih dan Induk Ikan Kerapu Pada UPTD BBIP Masika Jaya

No	Jenis Produk	Jumlah/Besar Produksi (butir/ekor)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Telur	35.000.000	52.500.000	-	-	35.000.000	70.000.000
2	Benih	500	-	-	-	-	-
3	Induk	21	21	21	12	12	26

Berdasarkan tabel jumlah produksi untuk 3 jenis produk tersebut dapat dilihat bahwa keberlanjutan produksi secara signifikan terdapat pada komoditi telur dengan jumlah produksi tertinggi tercatat pada tahun 2013 yaitu sebanyak

70.000.000 butir dengan rata-rata produksi per tahun adalah sebanyak 32.083.333 butir. Pada tahun 2010 dan 2011 tercatat pihak balai tidak dapat memproduksi telur yang disebabkan karena pengaruh tidak adanya anggaran operasional dan konflik manajemen internal dalam balai.

Untuk produksi benih dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini, karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang khususnya yang berkaitan erat dengan proses perbenihan, maka dapat disampaikan bahwa sampai saat ini UPTD BBIP Masika Jaya belum berhasil mengupayakan perkembangan dari level telur hingga menjadi benih. Sedangkan untuk induk, dapat diinformasikan bahwa sampai dengan tahun 2013 balai hanya memiliki 26 ekor induk dengan kualitas unggul. Tercatat bahwa sejak tahun 2008 sampai saat ini, induk yang dimiliki UPTD BBIP Masika Jaya adalah induk yang berasal dari alam dan bukan hasil budidaya.

Bila dilihat dari kemampuan memproduksi telur oleh UPTD BBIP Masika Jaya selama ini walaupun dengan kondisi sarana dan prasarana yang sangat terbatas, menunjukkan bahwa SDM yang dimiliki saat ini telah memiliki kemampuan secara teknis untuk melaksanakan proses tersebut. Secara prosedural kegiatan pemijahan ikan kerapu tikus dilakukan pada fase bulan baru dengan prosedur sebagai berikut: Sehari sebelumnya bak pemijahan (fiber glas) dengan kapasitas 21 ton dibersihkan dan dilanjutkan dengan pemindahan induk ikan kerapu tikus dari keramba jaring apung ke bak pemijahan. Selanjutnya setelah ikan dimasukkan ke dalam bak pemijahan maka dilakukan pengelolaan terhadap ikan induk sesuai dengan SOP yang berlaku dimana setiap hari ikan diberi pakan dengan dosis 3-5 % dari total biomass pada pagi hari. Satu jam

kemudian dilakukan penurunan ketinggian air hingga 50 cm dari dasar bak untuk menjaga daya tahan tubuh ikan agar tidak mudah terserang penyakit selama pemeliharaan sekaligus memacu kematangan gonad.

Ikan-ikan tersebut diberikan pula suplemen tambahan berupa vitamin B-com, vitamin C dan α -Tocopherol dengan interval waktu 2 hari sekali untuk pemberian masing-masing jenis obat. Setelah memasuki masa pemijahan pada bulan gelap tepatnya 20 – 22 hari, ikan kerapu tikus melakukan pemijahan dengan jumlah telur yang dihasilkan sebanyak \pm 2.5 juta butir/hari. Masa pemijahan biasanya terjadi selama 4-5 hari, akan tetapi kadang hanya berlangsung selama 1 hari memijah yang disebabkan oleh minimnya koleksi induk yang dimiliki yaitu 7 ekor dari yang seharusnya minimal 25 ekor yang terdiri dari 15 ekor betina dan 10 ekor jantan. Selain itu minimnya asupan gizi juga turut berpengaruh terhadap tingkat kematangan gonad. Kadang tidak semua induk matang gonad pada saat bersamaan karena dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah induk sehingga sepasang induk yang telah matang gonad tak mampu mempengaruhi induk lainnya.

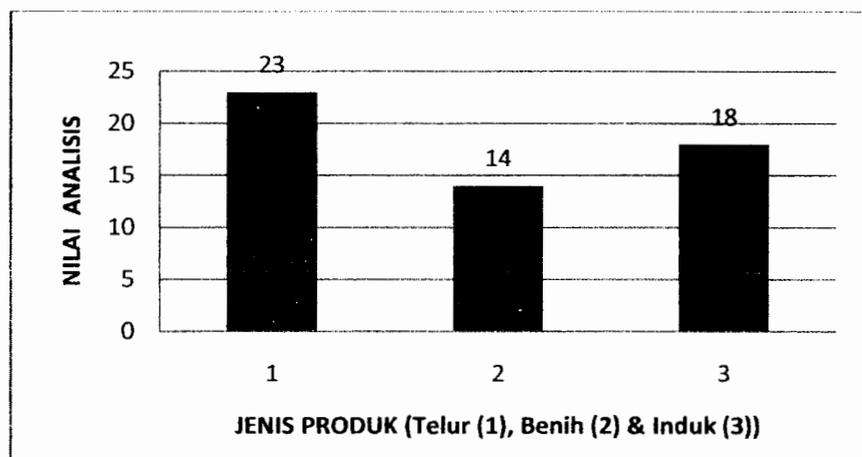
Ikan kerapu di UPTD BBIP Masika Jaya biasanya memijah pada malam hari. Pagi harinya dilaksanakan panen telur pada bak telur tepatnya dari dalam *egg collector*. Telur diangkat dengan menggunakan *scoop net* berukuran 500 mikron dan selanjutnya dipindahkan/dimasukan kedalam wadah yang telah diisi air laut bersih untuk menyeleksi telur yang berkualitas/terbuahi dan sebaliknya. Beberapa jam kemudian dilakukan penghitungan telur menggunakan saringan teh dimana perhitungan hanya dilakukan terhadap telur yang terbuahi saja yakni yang mengapung dan berwarna transparan, sedangkan yang tidak terbuahi akan mengendap dan berwarna keruh. Tahap selanjutnya terhadap telur yang telah

terbuahi, dimasukan kedalam aquarium untuk diinkubasi selama beberapa saat atau dengan kata lain diseleksi kembali. Setelah telur memasuki fase gastrulla akhir, telur yang ada dalam aquarium dipindahkan ke dalam wadah yang berisi air laut steril guna dilakukan desinfeksi dengan menggunakan larutan iodium dimana telur direndam selama setengah jam.

b. Penetapan Jenis Produk Pilihan

Bila ditinjau dari jumlah dan kemampuan produksi jenis produk telur pada UPTD BBIP Masika Jaya, maka kondisi ini harus disikapi serius oleh pengambil kebijakan di DKP Provinsi Maluku sendiri terutama yang terkait dengan penetapan *telur* sebagai salah satu jenis produk unggulan pada balai disamping tentunya benih dan induk unggul. Penetapan jenis produk telur ini dalam pandangan kami akan berpengaruh positif terhadap arah kebijakan, strategi dan perencanaan serta perhatian institusi terkait kedepan khususnya yang berkaitan dengan masalah perbenihan. Hal ini tentunya sejalan dengan pengertian strategi sendiri yaitu rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Bagus, 2012).

Gambaran hasil penetapan tiga jenis produk pilihan pada UPTD BBIP Masika Jaya yang telah dianalisis dengan menggunakan tabel analisis kesesuaian penetapan jenis produk pilihan yang mengacu pada 9 komponen penilaian, tergambar jelas pada grafik dibawah ini.



Grafik 4.3. Analisis Kesesuaian Pengembangan Jenis Produk Pilihan

Grafik diatas menggambarkan bahwa *telur* adalah merupakan jenis produk yang sangat berpeluang untuk dikembangkan pada UPTD BBIP Masika Jaya saat ini terutama bila mengacu pada komponen kemampuan memproduksi secara kontinyu, dukungan SDM/skill, dukungan kawasan/perairan, kualitas produk dan tentunya pasar. Bila dikaitkan dengan salah satu tujuan dari pengembangan perikanan budidaya di Indonesia yaitu produk yang dihasilkan harus memenuhi kriteria 7 tepat yaitu *tepat jenis, jumlah, ukuran, waktu, tempat, mutu dan harga* guna mendukung pencapaian target produksi perikanan budidaya, maka jenis produk telur ikan kerapu yang diproduksi oleh UPTD BBIP Masika Jaya telah memenuhi 7 kriteria tersebut.

Dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini, sudah tentu membutuhkan pengembangan produk pilihan yang sesuai dengan kondisi UPTD BBIP Masika Jaya sendiri. Satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan komoditi pilihan khususnya jenis produk *telur* adalah pengembangan strategi pemasaran dimana jalur distribusi yang nantinya akan dibuat harus dapat mempertimbangkan ketepatan waktu sampainya produk ke konsumen yang ada di Maluku khususnya maupun di Indonesia secara umum.

Terkait kondisi tersebut maka promosi dan sosialisasi tentang komoditi pilihan kepada konsumen tentunya sangat dibutuhkan. Upaya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Stanton, (2002) bahwa pemasaran mencakup usaha perusahaan yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan jenis produk, menentukan harga pokok yang sesuai, menentukan cara promosi serta penjualan produk tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut akan selalu berperan dalam suatu lingkungan yang terus-menerus berkembang sebagai konsekuensi sosial dari perubahan itu sendiri serta berpedoman pada aturan-aturan yang ada. Bagi pemasaran, perubahan lingkungan dapat menjadi tantangan baru yang memerlukan tanggapan dan cara penyelesaian yang baru pula ataupun sebaliknya dapat menjadi sebuah peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha.

Sudah tentu kemampuan Pemerintah Provinsi Maluku khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membuka peluang pasar bagi produk telur ikan kerapu akan sangat bermanfaat khususnya bagi pangsa pasar di luar Provinsi Maluku. UPTD selaku pelaksana tugas Pemerintah yang ada di daerah perlu didukung dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya. Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan tugas dan fungsi UPTD Perbenihan yang mengarah pada penyediaan induk unggul dan benih bermutu tentunya sangat diperlukan. Optimalisasi UPTD akan dapat terealisasi dengan adanya dukungan dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah melalui kebijakan serta strategi yang tepat. Dukungan yang diharapkan tersebut meliputi tersedianya SDM yang memadai baik kualitas maupun kuantitas, penyiapan sarana dan prasarana yang layak, penyiapan jalur pemasaran serta ketersediaan

anggaran yang memadai guna operasional UPTD (laporan Tahunan DKP Provinsi Maluku, 2013).

3. Strategi Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya

Perumusan strategis pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis. Alternatif-alternatif strategi yang merupakan rumusan strategi pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya, diuraikan dalam matriks SWOT pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Matriks Analisis SWOT

	S T R E N G T H S (S)	W E A K N E S S E S (W)
Faktor Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lahan yang memadai untuk pengembangan infrastruktur • Kebijakan Pemerintah Pusat yang mendukung pengembangan budidaya • Ketersediaan benih di alam yang memadai • Lokasi UPTD BBIP Masika Jaya yang strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Perhatian DKP Provinsi Maluku • Kontribusi pendanaan APBD maupun APBN yang minim • Minimnya sarana-prasarana yang tersedia • SDM yang belum profesional • Ketidacermatan penetapan komoditi/produk pilihan • Jalur transportasi, komunikasi dan ketersediaan BBM disekitar balai yang tidak mendukung
Faktor Eksternal		
O P P O R T U N I T I E S (O)	S T R A T E G I S O	S T R A T E G I W O
<ul style="list-style-type: none"> • Daerah pemasaran yang luas, mencakup kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku hingga ke mancanegara • Jaringan kerja mencakup lembaga terkait baik Pemerintah maupun sektor swasta • Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama antar lembaga terkait maupun sector swasta • Optimalisasi pemasaran produk • Optimalisasi pengembangan lahan • Pengembangan Sistem Informasi Perbenihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas kelembagaan • Optimalisasi Pengembangan Sarpras
T H R E A T S (T)	S T R A T E G I S T	S T R A T E G I W T
<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran Air karena penambangan & aktivitas lainnya • Hama dan Penyakit Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Balai Benih • Optimalisasi Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi dalam alokasi pendanaan • Pengembangan teknologi dalam mengoptimalkan

<ul style="list-style-type: none"> Keinginan Pihak DJPB-KKP untuk menutup balai 		Produk
--	--	--------

Kebanyakan balai benih ikan (BBI) milik pemerintah daerah tidak berfungsi secara optimal. Hal tersebut juga dialami oleh UPTD BBIP Masika Jaya. Minimnya sarana prasarana, terbatasnya dana operasional, kondisi bak/ruang pemijahan yang tidak memadai serta kurangnya tenaga operasional merupakan alasan yang sering mengemuka. Secara keseluruhan, semua alasan tersebut nampaknya bermuara pada kesalahan manajemen balai itu sendiri, mulai dari perencanaan pembangunan hingga operasionalnya. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi yang mampu menjawab permasalahan tersebut. Beberapa strategi yang dapat ditempuh dalam menjawab permasalahan serta pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya kedepan, adalah :

a. Strategi S-O

- 1) Strategi peningkatan kerjasama antar lembaga terkait maupun sektor swasta ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan volume penjualan produk (telur, benih dan induk) serta meningkatkan profesionalisme tenaga ahli yang terkait dengan teknis pembenihan ikan pada balai melalui pengembangan pola kemitraan dengan kelompok pembudidaya/swasta maupun lembaga perbankan/lembaga keuangan, lembaga riset dan perguruan tinggi.
- 2) Strategi optimalisasi pemasaran produk dimaksudkan untuk mengoptimalkan upaya pemasaran hasil/produk balai ((telur, benih dan induk) yang dapat ditempuh melalui pelaksanaan kegiatan pameran dengan "Show Room" Benih, meningkatkan fasilitasi pemasaran,

promosi dan pembentukan jaringan distribusinya baik didalam maupun diluar Maluku.

- 3) Strategi optimalisasi pengembangan lahan dimaksudkan untuk mengembangkan lahan yang ada dan belum termanfaatkan pada balai secara maksimal dengan mengacu pada penataan ruang yang sesuai persyaratan dan kelayakan teknis sehingga akan membantu kelancaran alur produksi dan higienitas produk.
- 4) Strategi pengembangan sistem informasi perbenihan; melalui kegiatan pendampingan teknologi informasi kepada pengelola data, pengembangan kerjasama antar unit pengelola statistik perikanan, penguatan teknologi informasi melalui penyempurnaan dan penyediaan perangkat sistem informasi.

b. Strategi W-O

- 1) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan internal pada balai melalui pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi dengan pihak-pihak terkait, penyelenggaraan pengawasan yang terstruktur, penguatan struktur organisasi kerja internal yang sesuai prosedur kerja teknis perbenihan serta domestikasi dan desiminasi.
- 2) Strategi optimalisasi pengembangan sarpras yang meliputi sarpras pokok, pendukung, penunjang, pengamanan dan pelengkap secara optimal dimana melalui pelaksanaan strategi ini secara bertahap diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja balai sesuai tupoksinya.

c. Strategi S-T

- 1) Strategi revitalisasi balai benih ini adalah strategi jangka pendek yang lebih memprioritaskan penataan/rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada saat ini untuk mengoptimalkan fungsinya dan atau memprioritaskan pembangunan khususnya pada fasilitas-fasilitas pokok seperti bangunan dan bak perbenihan, instalasi air bersih dan air laut, listrik/BBM, pakan dan ketersediaan induk yang berkualitas.
- 2) Strategi optimalisasi standarisasi dan sertifikasi perbenihan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), pembinaan sistem mutu perbenihan, pelatihan pembina, auditor dan Manajer Pengendali Mutu (MPM) perbenihan, akselerasi sertifikasi unit pembenihan.

d. Strategi W-T

- 1) Strategi efisiensi dalam alokasi pendanaan terutama yang terkait dengan pembangunan dan operasional teknis balai dimana anggaran yang tersedia haruslah sesuai dengan prioritas kebutuhan dan perencanaan.
- 2) Strategi pengembangan teknologi dalam mengoptimalkan pengawasan; dapat ditempuh melalui kegiatan pengawasan produksi benih yang diarahkan pada upaya terjaminnya kualitas telur, benih dan induk sejak dari balai sebagai produsen sampai kepada pengguna benih sebagai konsumen (pembudidaya). Pengawasan mutu benih mencakup pula kegiatan pengendalian lingkungan akibat kegiatan perbenihan. Karena

didalam pengawasan mutu benih dipersyaratkan proses-proses kegiatan yang berwawasan lingkungan.

4. Strategi Prioritas, Program, dan Kegiatan

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut maka dalam rangka menetapkan strategi prioritas dan mensinergikan strategi-strategi tersebut dengan tupoksi balai perbenihan dan rencana program/kegiatan UPTD BBIP Masika Jaya ke depan, selanjutnya 10 strategi pengembangan tersebut dikelompokan atas empat kriteria yaitu (1) kriteria peningkatan kapasitas kelembagaan balai, (2) kriteria peningkatan fungsi dan peran balai kepada masyarakat dan kawasan, (3) kriteria peningkatan nilai tambah produk dan (4) kriteria pengembangan infrastruktur balai.

Urutan strategi prioritas pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh 32 (tiga puluh dua) responden dengan teknis *Purposive sampling* yang dilaksanakan selama penelitian secara jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8. Urutan Strategi Prioritas Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya

No	Kriteria	Strategi	Bobot	Peringkat
1.	Pengembangan Infrastruktur Balai (K4)	Revitalisasi Balai Benih	4,94	1
2.	Pengembangan Infrastruktur Balai (K4)	Optimalisasi Pengembangan Sarpras	4,56	2
3.	Peningkatan Nilai Tambah Produk (K3)	Optimalisasi & Sertifikasi Perbenihan	4,53	3
4.	Peningkatan fungsi dan peran balai kepada masyarakat dan kawasan (K2)	Pengembangan Teknologi & Optimalisasi Pengawasan	4,31	4
5.	Pengembangan Infrastruktur Balai	Efisiensi Alokasi Pendanaan	4,28	5

	(K4)			
6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai (K1)	Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Terkait/Swasta	4,22	6
7.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai (K1)	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pada Balai	4,16	7
8.	Pengembangan Infrastruktur Balai (K4)	Optimalisasi Pengembangan Lahan	3,97	8
9.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai (K1)	Pngembangan Sistem Informasi Perbenihan	3,88	9
10.	Peningkatan Nilai Tambah Produk (K3)	Optimalisasi Pemasaran Benih	3,81	10
Rata-rata			4,27	

Berdasarkan tabel tersebut tergambar bahwa strategi revitalisasi balai benih melalui penataan dan pembangunan fasilitas-fasilitas pokok seperti bangunan dan bak perbenihan, instalasi air bersih dan air laut, instalasi listrik/BBM, pakan dan ketersediaan induk yang berkualitas serta strategi optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana balai adalah merupakan strategi-strategi prioritas yang harus secepatnya dilaksanakan pada UPTD BBIP Masika Jaya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang digambarkan dalam pedoman umum CPIB, (2008) bahwa disamping beberapa faktor penunjang seperti lokasi dan sumberdaya manusia, faktor kelayakan fasilitas suatu unit pembenihan ikan menjadi faktor yang cukup penting dan merupakan suatu keharusan dalam menunjang keberhasilan operasional unit pembenihan karena kelayakan fasilitas akan mempengaruhi operasional unit pembenihan secara optimal. Kelayakan fasilitas dimaksud adalah kesesuaian ketersediaan fasilitas/sarana pembenihan yang mencakup jumlah, kondisi dan kemampuan (daya dukung).

Selanjutnya strategi-strategi pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya tersebut diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas

pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya dalam kurun waktu 5 tahun (2015 s/d 2019) beserta desain layout rencana pengembangan sarana dan prasarana balai dan secara jelas dapat dilihat pada tabel roadmap rencana pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya periode 2015 – 2019 sebagai berikut.



Tabel 4.9. Roadmap Rencana Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya Periode 2015 – 2019

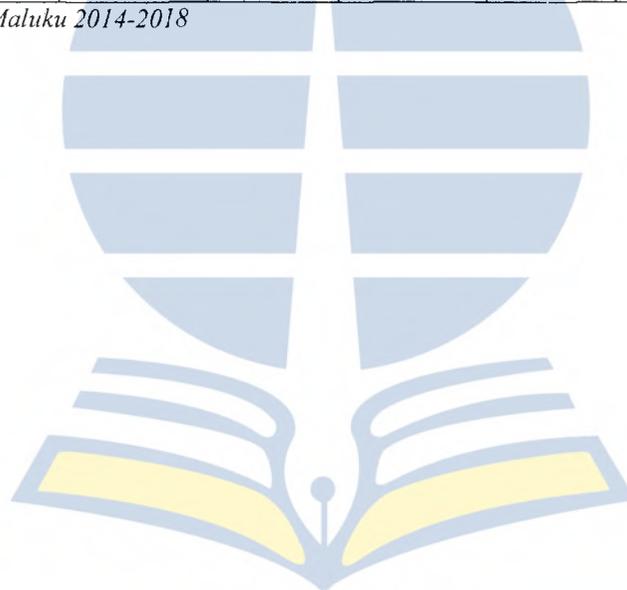
No	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA CAPAIAN/PENDANAAN									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)	Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)	Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)	Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)	Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		153.870		185.500		231.500		280.000		280.000
	- Penyediaan jasa surat menyurat	12 bln	2.500	12 bln	2.500	12 bln	3.000	12 bln	3.000	12 bln	3.000
	- Penyediaan jasa komunikasi dan listrik	12 bln	36.000	12 bln	48.000	12 bln	60.000	12 bln	72.000	12 bln	72.000
	- Penyediaan jasa kebersihan Kantor	12 bln	45.000	12 bln	45.000	12 bln	60.000	12 bln	75.000	12 bln	75.000
	- Penyediaan ATK	12 bln	10.000	12 bln	12.000	12 bln	15.000	12 bln	20.000	12 bln	20.000
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	7.500	12 bln	12.000	12 bln	15.000	12 bln	25.000	12 bln	25.000
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	1 thn	3.500	1 thn	5.000	1 thn	7.500	1 thn	10.000	1 thn	10.000
	- Penyediaan makanan dan Minuman	12 bln	20.570	12 bln	25.000	12 bln	35.000	12 bln	35.000	12 bln	35.000
	- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	2 org	28.800	3 org	36.000	3 org	36.000	4 org	40.000	4 org	40.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4.156.880		2.826.000		3.395.000		1.380.000		2.775.000
	- Pembangunan Mesh Pegawai	1 Pkt	1.000.000	1 Pkt	750.000	1 Pkt	750.000	1 Pkt	650.000	1 Pkt	650.000
	- Pemeliharaan rutin/berkala	12 bln	26.880	12 bln	36.000	12 bln	45.000	12 bln	60.000	12 bln	75.000

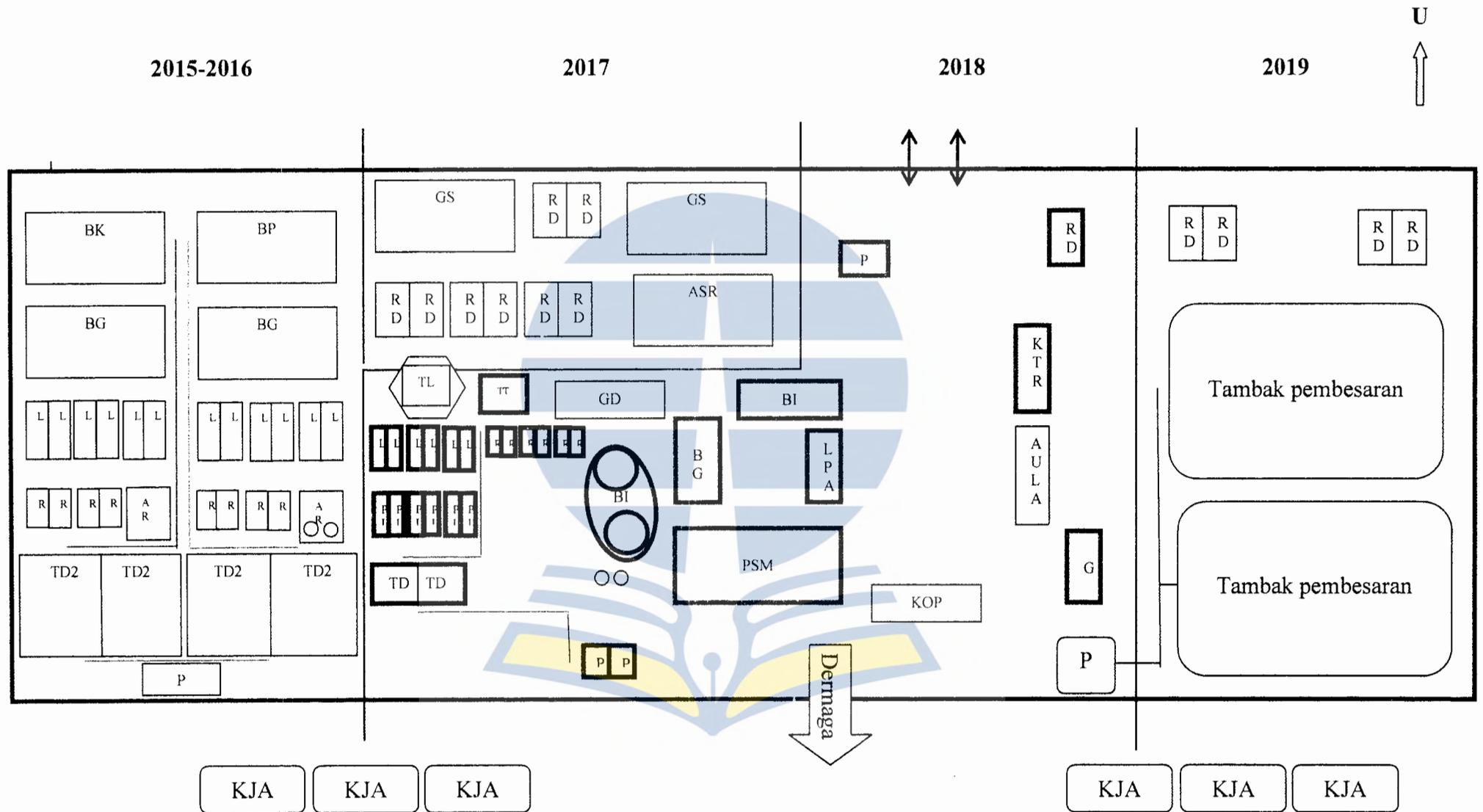
No	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA CAPAIAN/PENDANAAN									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)	Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)	Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)	Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)	Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)
	kendaraan Dinas/Operasional										
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bln	80.000	12 bln	90.000	12 bln	100.000	12 bln	120.000	12 bln	150.000
	- Pembangunan ruangan perbenihan dan bak perbenihan (10*15)	1 Paket	500.000								
	- Pembangunan bak plankton dan bak kultur masal	18 unit	150.000								
	- rehabilitasi ruang outdoor	1 unit	200.000								
	- rehabilitasi instalasi listrik	1 Pkt	50.000								
	- Pembangunan talud pantai					500 m	1.500.000				
	- Pembangunan Tandon air laut		650.000								
	- Pengadaan Filter Air Laut		250.000								
	- rehabilitasi kantor dinas							1 unit	200.000		
	- Pembangunan Jalan Masuk dan jalan lingkungan			1 km	1.000.000						
	- rehabilitasi pagar & papan nama Balai			1 Pkt	550.000						
	- pengadaan sarana LTS	1 Pkt	500.000								
	- rehabilitasi ruang laboratorium dan ruang karantina/hama penyakit					1 pkt	250.000			1 pkt	250.000
	- Pembangunan Rumah Dinas/karyawan					3 Unit	600.000				
	- Pembangunan Guest House									1 Unit	750.000
	- Pembangunan Dermaga Kayu/jetty			1 Unit	300.000						
	- Pengadaan Kolam/Tambak									2 Unit	550.000

No	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA CAPAIAN/PENDANAAN									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)	Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)	Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)	Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)	Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)
	Pembesaran - Pengadaan Mesin Pompa (2 Bh) - Pengadaan Mesin Genset 15 Kva - Pembangunan Pos penjagaan/Satpam - Pembangunan aula/workshop - Pembangunan Gedung Koperasi - Pembangunan Rumah Genset/pompa - Pembangunan Saluran Air & Limbah		250.000 300.000	1 Unit	100.000			1 Unit	350.000	1 Unit	350.000
		1 pkt	200.000			1 Unit	150.000				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		121.000		121.000		121.000		140.000		140.000
	- Pendidikan dan pelatihan teknis	8 orang	81.000	8 orang	81.000	8 orang	81.000	8 orang	100.000	8 orang	100.000
	- Konsultasi ke pusat/UPT	4 Orang	40.000	4 Orang	40.000	4 Orang	40.000	4 Orang	40.000	4 Orang	40.000
4	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		1.100.000		240.000		1.115.000		320.000		970.000
	- Pembelian Induk	50 ekor	50.000	50 ekor	50.000	75 ekor	75.000	75 ekor	75.000	100 ekor	100.000
	- Pembelian Pakan dan Bahan obat-obatan	1 Pkt	75.000	1 Pkt	100.000	1 Pkt	100.000	1 Pkt	125.000	1 Pkt	150.000
	- Pengadaan KJA (Aquatek)	1 Unit	500.000			1 Unit	400.000			1 Unit	500.000
	- Kit Test Kualitas Air	1 Pkt	50.000			1 Pkt	50.000			1 Pkt	100.000
	- Sarana Pengangkut Benih Darat	1 Unit	350.000								
	- Sarana Pengangkut Benih Laut					1 Unit	400.000				

No	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA CAPAIAN/PENDANAAN									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Satuan, Ukuran, Volume	Biaya (Rp. 000)								
	- Pendampingan pada kelompok tani Pembudidaya	2 keg	75.000	3 keg	90.000	3 keg	90.000	3 keg	120.000	3 keg	120.000
			5.531.750		3.372.500		4.862.500		2.120.000		4.165.000

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 2014-2018





Gambar 4.4. Layout Rencana Pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya 2015-2019

Keterangan :

1. KTR : Kantor
2. RD : Rumah Dinas
3. PS : Pos Satpam
4. GS : Gues House
5. ASR : Asrama
6. GD : Gudang
7. KOP : Koperasi Karyawan
8. G : Rumah Genset
9. P : Pompa Air Laut
10. TT : Tower Air Tawar
11. TL : Tower Air Laut
12. BI : Bangsal Indoor
13. LPA : Lab Pakan Alami
14. PSM : Plankton Semi Massal
15. BG : Bangsal Gelondongan
16. I : Bak Induk
17. TD : Pengolahan Air Laut (Volume 40 ton)
18. TD 2 : Pengolahan Air Laut (Volume 400 ton)
19. PL : Plankton Massal
20. R : Kuntur Rotifer
21. AR : Kultur Artemia
22. BK : Bak Karantina
23. Tambak Pembesaran Multi Species (Kerapu & Udang Windu/Vaname)
24. KJA : Pembesaran Kerapu

Dengan mengacu pada strategi, program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang telah tergambar diatas, maka besar harapan pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya dapat lebih optimal guna menjawab berbagai tantangan pembangunan perikanan budidaya di Provinsi Maluku terutama yang terkait dengan penyediaan telur, benih dan induk unggul dan jalur distribusinya serta mengoptimalkan upaya transfer teknologi perbenihan ikan kepada masyarakat pembudidaya sehingga keberadaan balai dalam menopang pengembangan ekonomi kawasan dan masyarakatnya dapat lebih dimaksimalkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Bila dibandingkan dengan kondisi ideal sebuah balai benih yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, secara umum kondisi sarana dan prasarana serta sumberdaya aparatur di UPTD BBIP Masika Jaya berada pada level yang sangat tidak maksimal untuk menunjang optimalisasi kinerja balai terutama dalam hal penyediaan produk benih dan induk unggul secara kontinyu.
- 2) Mengacu pada faktor kualitas jenis produk, kemampuan memproduksi dan ketersediaan pasar, UPTD BBIP Masika Jaya saat ini disamping berupaya untuk memenuhi tupoksinya dalam memproduksi benih dan induk unggul, perlu pula memprioritaskan arah kebijakannya untuk mempertahankan *trend* produksi telur serta melaksanakan distribusi dan perdagangannya.
- 3) Dalam rangka optimalisasi kinerjanya, UPTD BBIP Masika Jaya perlu menerapkan 10 strategi pengembangan berdasarkan 4 kriteria pengembangan dengan lebih memprioritaskan pada strategi revitalisasi balai benih melalui penataan dan pembangunan fasilitas-fasilitas pokok seperti bangunan dan bak perbenihan, instalasi air bersih dan air laut, instalasi listrik/BBM, pakan dan ketersediaan induk yang berkualitas.

B. Saran

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sebagai institusi induk, dalam upaya untuk mengoptimalkan kinerja dan memaksimalkan pelaksanaan

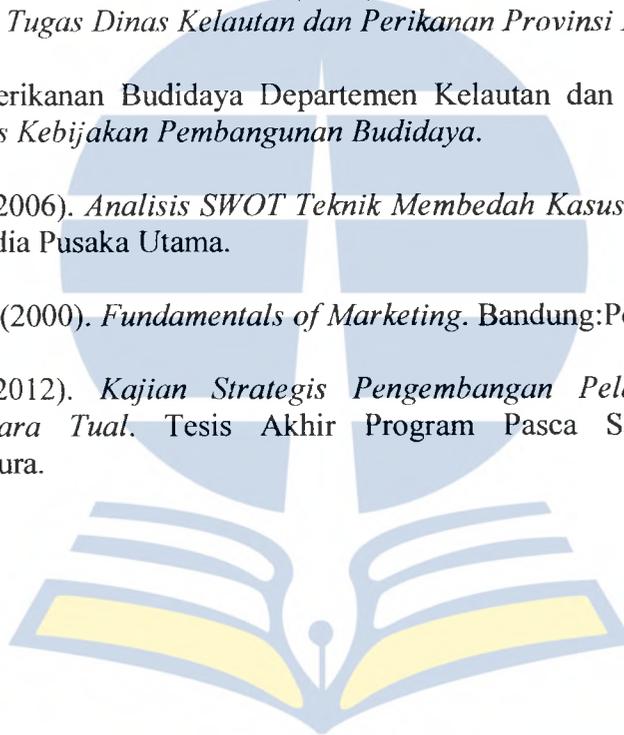
tupoksi UPTD BBIP Masika Jaya guna menunjang kemajuan perikanan budidaya di Provinsi Maluku, perlu segera menatakelola dan merencanakan pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya melalui strategi, program dan kegiatan prioritas yang terukur secara bertahap dengan lebih memprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana dan peningkatan kompetensi SDM.

- 2) Upaya pengembangan/revitalisasi sarana dan prasarana yang menjadi syarat dan kelayakan teknis suatu unit perbenihan serta peningkatan kompetensi SDM (kualitas dan kuantitas) sangat diperlukan saat ini di UPTD BBIP Masika Jaya agar mampu berperan sesuai fungsinya dalam melaksanakan penerapan teknologi perbenihan dan bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu induk dan benih unggul serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.
- 3) Peningkatan kinerja UPTD BBIP Masika Jaya guna menunjang pembangunan perikanan budidaya di Provinsi Maluku tentunya sangat membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah daerah dan pihak swasta melalui keberpihakan kebijakan dalam bentuk penganggaran sesuai prioritas perencanaan. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan UPTD BBIP Masika Jaya secara berkelanjutan.
- 4) Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan kajian yang lain di waktu mendatang seperti kajian tentang aspek teknis dan operasional, kajian tentang dampak eksistensi UPTD BBIP Masika Jaya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat pembudidaya, dan atau kajian prospektif pengembangan hatchery skala rumah tangga berbasis BBIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamsz, J. (2010). *Analisis Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan : Komparasi Extand sebagai Instrumen Evaluasi*. Ambon.
- Bagus, D. (2012). *Konsep Strategi: Definisi, Perumusan, Tingkatan dan Jenis Strategi*. Jurnal Manajemen.
- Barokah, U. (2010). *Strategi Pengembangan Perikanan Tambak Sebagai Sub Sektor Unggulan di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Ilmiah.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, 2008-2013. *Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku*. Ambon.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, 2014-2019. *Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku*, Ambon.
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. (2008). *Pedoman Umum Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)*.
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya - Direktorat Perbenihan. (2010). *Petunjuk Teknis UPTD*.
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Perbenihan, (2010). *Analisis Kinerja UPTD*.
- Direktorat Produksi. (2008). *Kumpulan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Pembudidayaan*. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Direktorat Produksi. (2009). *Kumpulan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sarana Budidaya*. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Dunn, W.N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Second Edition. Englewood Cliffs New Jersey: .
- Dwiyanto, F. S. (2013). *Revitalisasi UPTD BBIP Masika Jaya Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Benih Ikan Kerapu (Kajian Evaluatif)*.
- Halim, R. (2014). *Analisis Strategi Peningkatan Kinerja Bagian Sekretariat Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai*. Jurnal Ilmiah.

- Imawan, T. Y. (2014). *Strategi Pengembangan Pembenihan Ikan Patin (pangasius hypophthalmus) di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor*. Jurnal Ilmiah Universitas Terbuka.
- Imran, A. (2002). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2010). *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*, Jakarta.
- Pelatihan Pembenihan Ikan Kerapu. (2007). BBAP Situbondo. *Kerjasama antara Dept. Kelautan dan Perikanan RI dan Japan International Cooperation Agency (jica)*. Kumpulan Materi Praktik dan Teori Perbenihan.
- Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. (2009). *Peraturan Gubernur Maluku tentang Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku*, Ambon.
- Pusat Riset Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan. (2006). *Analisis Kebijakan Pembangunan Budidaya*.
- Rangkuti, F. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta, PT. Gramedia Pusaka Utama.
- Stanton, W. J. (2000). *Fundamentals of Marketing*. Bandung: Penerbit Indocity.
- Wenno, J. (2012). *Kajian Strategis Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual*. Tesis Akhir Program Pasca Sarjana Universitas Pattumura.



Lampiran 1.

INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam Penelitian ini instrumen data primer diambil secara langsung pada UPTD BBIP Masika Jaya khususnya yang terkait dengan variabel-variabel yang telah ditentukan seperti kondisi sarana dan prasarana (pokok, pendukung, penunjang, pengaman dan pelengkap), ketersediaan air, SDM serta induk melalui pengamatan dan penilaian serta melalui studi kepustakaan terhadap beberapa dokumen penting pada balai seperti laporan tahunan, laporan perkembangan kegiatan, profil balai dan lain-lain. Kemudian untuk memperkuat kualitas data primer tersebut, juga dilaksanakan wawancara yang sifatnya bebas terstruktur dengan berbagai pihak terkait pada balai.

Selanjutnya data sekunder untuk menunjang penelitian ini diperoleh melalui kunjungan pada beberapa institusi terkait antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan UPT BBL Ambon untuk mendapatkan berbagai bahan referensi tertulis serta melalui komunikasi lewat telepon untuk pengiriman bahan penunjang lainnya melalui email oleh UPT BBAP Situbondo serta tentunya lewat penelusuran pada website Ditjen Perikanan Budidaya KKP RI dan beberapa jurnal penelitian.

Setelah selesai melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta pengolahan data khususnya data (output) berupa staregi-strategi pengembangan balai, selanjutnya dibuat kuesioner berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada 32 orang responden melalui *purposive sampling* guna memboboti strategi-strategi pengembangan tersebut.

Lampiran 2.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara yang dilaksanakan terhadap populasi dan sampel pada penelitian ini adalah bersifat bebas dan terstruktur dimana lebih diarahkan untuk mendapatkan data dan berbagai informasi penting khususnya yang berkaitan dengan seluruh variabel dan instrumen penelitian yang telah ditetapkan dan diarahkan agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai secara maksimal.

Point-point penting yang menjadi topik khusus dalam wawancara ini antara lain :

- Berbagai penyebab/permasalahan utama belum optimalnya kinerja UPTD BBIP Masika Jaya.
- Masih adakah peluang UPTD BBIP Masika Jaya untuk dikembangkan?
- Apa sajakah tantangan yang dihadapi?
- Bagaimanakah kondisi aksesibilitas UPTD BBIP Masika Jaya?
- Bagaimana keberadaan komponen penunjang produksi (pakan, listrik dan BBM) selama ini?
- Sudah adakah prosedur kerja teknis perbenihan yang dimiliki serta apakah bisa diterapkan jika diperhadapkan dengan kondisi yang ada?
- Bagaimanakah kondisi kualitas dan kuantitas SDM saat ini?
- Seberapa besar peran DKP Provinsi Maluku sebagai intansi induk dalam menunjang pengembangan UPTD BBIP Masika Jaya?
- Bagaimana kondisi anggaran pembangunan UPTD BBIP Masika Jaya selama ini?

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

Observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini secara khusus lebih diarahkan pada empat hal pokok yaitu (1). Letak dan aksesibilitas UPTD BBIP Masika Jaya, (2). Kondisi terkini keadaan sarana dan prasarana di UPTD BBIP Masika Jaya, (3). Aktivitas SDM sesuai prosedur kerja teknis perbenihan,. dan (4). Dokumen Perencanaan pembangunan UPTD BBIP Masika Jaya dalam 5 tahun.

DATA/INFORMASI

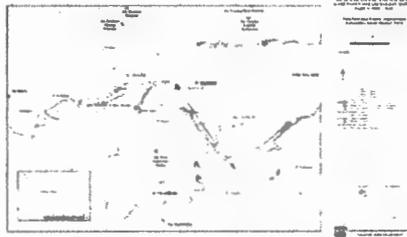
HASIL PENYEBARAN KUESIONER

Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Strategi Pengembangan BBIP Masika Jaya

Responden	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	Jumlah	Rata2
1	5	4	3	4	3	4	4	5	5	4	41	4,1
2	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	40	4
3	4	4	3	5	3	5	4	5	5	5	43	4,3
4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	46	4,6
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
6	5	4	4	4	5	5	3	5	4	4	43	4,3
7	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	47	4,7
8	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	47	4,7
9	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49	4,9
10	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	48	4,8
11	4	5	4	4	3	4	5	5	4	5	43	4,3
12	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	44	4,4
13	5	4	5	5	3	5	4	4	5	4	44	4,4
14	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	43	4,3
15	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	45	4,5
16	4	4	3	4	3	5	3	5	4	3	38	3,8
17	3	4	3	4	4	4	4	5	5	4	40	4
18	4	3	3	4	4	4	4	5	5	4	40	4
19	5	4	4	4	4	5	3	5	4	3	41	4,1
20	5	4	4	4	3	5	5	5	5	4	44	4,4
21	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	40	4
22	4	3	4	4	3	5	4	5	4	4	40	4
23	3	4	4	4	4	5	4	5	5	4	42	4,2
24	4	4	5	4	5	4	3	5	4	5	43	4,3
25	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	44	4,4
26	4	4	3	4	4	5	4	5	5	4	42	4,2
27	3	4	3	4	4	4	3	5	5	4	39	3,9
28	3	3	3	4	3	4	3	5	4	4	36	3,6
29	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	42	4,2
30	4	5	3	5	4	4	3	5	5	3	41	4,1
31	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	41	4,1
32	3	4	3	4	4	4	3	5	5	4	39	3,9
Total	135	133	124	138	122	145	127	158	146	137	1365	136,5
Rata2	4,22	4,16	3,88	4,31	3,81	4,53	3,97	4,94	4,56	4,28	42,6563	4,27
Peringkat	6	7	9	4	10	3	8	1	2	5		

DATA/INFORMASI

HASIL OBSERVASI



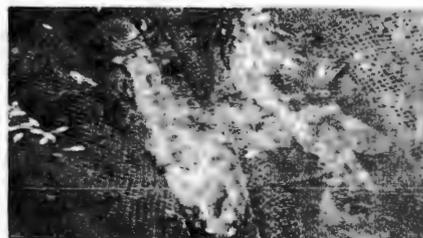
Peta lokasi dan aksesibilitas UPTD BBIP Masika Jaya



Aktivitas Pada Balai sesuai Prosedur Kerja



Kondisi kantor dan Bak Pemijahan



Konsisi Rumah Pompa dan Induk (KJA)



Wawancara dan Pengumpulan Data Lapangan